



WRM Bulletin
World Rainforest Movement
Nomor 229 – Februari / Maret 2017

**Asia Tenggara: menghubungkan rakyat melawan
investasi dan inisiatif konservasi skala-besar**



SUDUT PANDANG KAMI

Asia Tenggara: Memperkuat perlawanan melampaui sekat-batas 3

**ASIA TENGGARA: MENGHUBUNGKAN RAKYAT MELAWAN INVESTASI
DAN INISIATIF KONSERVASI SKALA-BESAR**

Investasi dan inisiatif konservasi iklim skala-besar merusak hutan dan wilayah-kelola rakyat 6

Konflik Hutan di Thailand: Negara vs. Rakyat 10

Myanmar: Kebijakan baru mengangkat hak-hak masyarakat asli yang terancam 15

Hutan di Timur Laut India 21

Indonesia: Rencana Undang-Undang mengancam kembalinya kuasa korporasi atas keragaman-hayati-pertanian 28

Melawan Kutukan Konsesi di Kamboja 32

Malaysia: Kelompok-kelompok masyarakat asli dari seluruh dunia mengadopsi deklarasi anti-dam 37

RAKYAT BERTINDAK

- Honduras: Negara paling mematikan di dunia bagi aktivisme lingkungan hidup. **40**
- Guyana Perancis: Pemerintah Perancis diam-diam mempromosikan industrialisasi pertambangan emas di Guyana Perancis. **41**
- India: Investigasi BBC menyingkap korban dari kebijakan tembak-mati di suaka harimau. **41**
- Malaysia: Stop pengakuan perkebunan sebagai hutan, FAO diperingatkan. **42**
- Indonesia: Protes di Jawa melawan perusakan hutan oleh industri semen yang meluas. **43**

PATUT DIBACA

- Laporan Pertemuan: Apa yang tengah terjadi dengan hutan kita? **43**
- Video *Save our River, Save our Life* (Selamatkan Sungai kita, Selamatkan Hidup kita) mengenai ancaman pertambangan emas pada Sungai Tanintharyi di Myanmar **44**
- Laporan: Kenapa & Bagaimana Pertanian Ekologis?! **44**
- Laporan: Menanam bencana: Fortune 500 hendak bertani **45**
- Wawancara: "Tidak ada Kelapa sawit berkelanjutan dari produksi kelapa sawit industrial". **45**
- Laporan: Menandatangani Pelepasan Kedaulatan: Bagaimana Kesepakatan-Kesepakatan Investasi Mengancam Regulasi Industri Pertambangan di Filipina **45**

SUDUT PANDANG KAMI



Asia Tenggara: Memperkuat perlawanan melampaui sekat batas

Ini adalah buletin regional ketiga dari *World Rainforest Movement* dalam 10 bulan terakhir. Terbitan regional pertama (Buletin WRM 224) mengulas penyebab perampasan tanah di wilayah Cekungan Kongo di Afrika. Buletin regional kedua, terbitan nomor 226, khusus membahas bagaimana rakyat melawan masa lampau penjajahan yang melekat melalui pemaksaan dan kekerasan di seujur Amerika Tengah. Di nomor ini, fokusnya adalah tentang wilayah yang biasanya disebut sebagai Asia Tenggara.

Dengan buletin-buletin regional ini, WRM ingin menarik perhatian pada perjuangan perlawanan di wilayah-wilayah yang terutama dipengaruhi oleh perusakan hutan. Tujuannya bukan saja untuk menampilkan situasi dan perjuangan komunitas, tetapi juga untuk mendukung proses-proses yang menantang dalam berjejaring dan membangun gerakan di antara organisasi-organisasi komunitas, kelompok-kelompok aktivis serta gerakan-gerakan sosial di negara-negara di masing-masing wilayah dan lintas wilayah yang berbeda.

Menerbitkan buletin regional merupakan proses belajar yang baik. Kami mencatat, misalnya, bahwa pembatas-geografis yang membingkai negara-negara bangsa yang berada di wilayah-wilayah yang disoroti seringkali memisahkan dan mengisolasi komunitas yang berjuang mempertahankan kehidupan dan hutannya. Asia Tenggara tidak terkecuali. Wilayah-wilayah negara dikenal sebagai negara Kamboja, Indonesia, Timor Timur, Laos, Malaysia, Brunei, Burma (Myanmar), Philippines, Singapura, Thailand dan Vietnam biasanya berada di bawah istilah Asia Tenggara, tetapi Papua Nugini, Propinsi Yunnan dari Tiongkok, atau negara bagian Manipur dari India tidak dipandang sebagai bagian dari wilayah ini. Pengesampingan negara-negara yang disebut belakangan menyingkap bahwa istilah Asia Tenggara lebih merupakan acuan politis daripada semata-mata geografis. Pemahaman mutakhir dari istilah tersebut dimulai sejak proses yang relatif baru ketika negara-negara Eropa yang menjajah mulai membelah-belah wilayah yang sangat luas tersebut di antara mereka. Penaklukan ini,

meskipun dalam agenda dengan nama yang berbeda dan melibatkan segerombolan besar pelaku-pelaku institusional, berlangsung sampai hari ini.

Di bulan Nopember 2016, kolega dan kawan dari sebagian besar negara di wilayah Asia Tenggara berhimpun di Bangkok, Thailand/Siam, untuk berbagi cerita dan perasaan dari konteks lokal krisis yang beragam. Pertemuan berpusat pada keprihatinan bersama: "apa yang tengah terjadi dengan hutan kita?" Membandingkan, membahas dan merajut kesamaan dalam ingatan yang dibawa para peserta ke pertemuan, pertanyaan ini seketika menyingkap sebuah cerita tentang Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah "hutan yang lenyap". Penglihatan ini tajam sekali kontrasnya dengan citra wilayah "pertumbuhan dan pembangunan" yang telah disalah-tampilkan oleh elit politik dan para perumus kebijakan di lembaga-lembaga internasional. Sebuah sintesis dari tuturan mengenai krisis dari para peserta telah menemukan sejumlah kesamaan dan juga keunikan di antara situasi komunitas di berbagai negara. Salah satu kesamaan tersebut adalah pengalaman bahwa yang disebut-sebut sebagai "kerangka pertumbuhan hijau" ternyata sama di tiap negara. Ini merupakan doktrin pertumbuhan ekonomi ekstraktif lama - sekarang dengan label "hijau". Proses-proses merusak dengan kedok hijau melibatkan banyak pelaku, baik lama maupun baru - dan umumnya bukan pelaku setempat. Pada saat yang sama ketika cakap "pertumbuhan hijau" didorong, pemerintahan di wilayah Asia Tenggara menjadi makin bergantung pada ekstraktivisme untuk survival politik mereka. Masyarakat setempat, di lain pihak, terus dikambing-hitamkan untuk perusakan lingkungan hidup, dan ketergantungan antar generasi mereka pada lahan hutan untuk kebutuhan dasar mereka digambarkan sebagai penyebab kemiskinan. Penggunaan kekerasan dan penindasan terhadap mereka meningkat. Pada saat yang sama, komunitas lebih tinggi perlawanan dan pembelaannya, maju dalam membongkar dan membalik strategi pengambing-hitaman tersebut.

Salah satu kesan terkuat dari pertemuan di Bangkok adalah bahwa nasib dari hutan-rimba di sepanjang gejolak serta watak merusak dari "kemajuan" menyingkap tali-temali yang tak terlihat yang menautkan cerita-cerita dari bagian wilayah Asia daratan - - termasuk India Timur Laut dan Mekong - dan subwilayah kepulauan dari Malaysia, Indonesia dan Filipina. Negara dan pelaku-pelaku swasta yang bertanggung-jawab atas perusakan yang mencirikan "pembangunan" di seluruh wilayah telah harus selalu mengarang cerita-cerita penyamar yang mengemukakan perusakan ini sebagai "kemajuan" dan melukiskan praktik-praktik agroekologis beserta anyaman sosial dalam komunitas yang bernaung pada hutan sebagai terbelakang, kuno dan tak produktif. Kenyataannya tidak bisa lebih jauh dari representasi yang ngawur ini.

Sebagai akibat dari tekanan tak kenal henti ini, kesatuan sosial-ekologis dalam dan antar komunitas telah mulai rontok di berbagai tempat sementara keragaman dalam bentuk, institusi dan mekanisme solidaritas kemanusiaan menjadi sumber amunisi bagi politik pecah-belah. Terakhir tapi bukannya paling tidak penting, pembunuhan dan perampokan dikaburkan dengan memberinya pakaian dan nama baru. Untuk menyebut beberapa saja, di Filipina, rangkaian pembunuhan di luar pengadilan adalah "penggerebekan hukum-dan-ketertiban" (1); di Kamboja, lambatnya penyelidikan resmi dari penembakan brutal mengambing-hitamkan tidak adanya laporan keluarga korban kepada Polisi (2); di Indonesia, dukungan pendanaan untuk memuluskan perluasan perkebunan kelapa sawit menggunakan kata-kata kunci seperti "Mengamankan Hak Komunitas Lokal atas Tanah dengan melibatkan Sektor Perkebunan" atau "Mendukung

Usaha-Usaha untuk Melindungi Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi/Stok Karbon Tinggi di dalam Konsesi-Konsesi Kelapa Sawit". (3)

Satu cara bagi mereka yang bertanggung-jawab atas perusakan untuk membungkam dan menyembunyikan perusakan hutan dan derita yang ditimbulkannya serta perlawanan komunitas di seluruh Asia Tenggara adalah dengan mengontraskan kerusakan dengan rencana-rencana "pembangunan". Rencana Aksi Perhutanan Tropis (*Tropical Forestry Action Plan/TFAP*) tahun 1986 dari Bank Dunia, misalnya, menamai perusakan sebagai "pembangunan industri berbasis hutan", menambahkan perluasan wilayah konservasi sebagai cara untuk mengendalikan perusakan. Tepat tiga dasawarsa kemudian, pertemuan di Bangkok mengamati bahwa meskipun TFAP telah lama tutup buku, perpaduan yang ganjil dari perlindungan hutan dan perusakan hutan yang diperkenalkan dulu sekarang hadir dengan nama-nama baru: sebagai kebijakan, program atau kerangka untuk "pertumbuhan hijau"; sebagai "skenario menang-menang" untuk "lingkungan hidup dan pembangunan", atau untuk "konservasi dan penanggulangan kemiskinan"; sebagai kredit atau kompensasi ("*offset*") karbon sebagai imbalan dari pengakuan hak; sebagai koridor-koridor keragaman hayati" atau "kompensasi keragaman hayati" ("*biodiversity offsetting*") untuk "pertambangan dengan dampak positif pada keragaman hayati". Apapun nama barunya, akibatnya bagi komunitas naungan hutan tetap sama di bawah program-program yang menyerupai TFAP: pembatasan atas praktik pemanfaatan tanah tradisional atau bahkan kehilangan tanah bagi pencaplokan hijau atas lahan.

Sementara kemajuan dari perusakan hutan tak pernah punya batas, pertemuan hati di Bangkok menunjukkan bahwa perlawanan dan penyembuhan memiliki kekuatan untuk mempersatukan komunitas dan masyarakat melampaui sekat batas, di Asia Tenggara dan di seluruh bumi. Terbitan buletin ini adalah sebuah cara lain untuk mendukung dan menyebar-luaskan pesan tersebut. Untuk mendukung proses tersebut, buletin ini -- yang memuat artikel-artikel tentang India Timur-laut, Thailand, Myanmar, Malaysia, Indonesia dan Kamboja, dan juga sebuah artikel dengan pandangan menyeluruh tentang wilayah -- akan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa utama di wilayah tersebut.

Kami berharap anda akan dapat menikmati buletin ini!

(1) Duterte-nya Filipina menyejajarkan diri dengan Hitler dalam perang melawan narkoba. AFP, September 30, 2016 and

<https://www.youtube.com/watch?v=MU5W5CJAPH4>

(2) Police Blame Family for Stalled Probe Into Lost Boy. The Cambodia Daily, September 2, 2015. <https://www.cambodiadaily.com/news/police-blame-family-for-stalled-probe-into-lost-boy-93151/>

(3) Climate and Land Use Alliance Indonesia Initiative. Grants and Contracts List. http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/01/Indonesia-Grants-List_2017-Q1.pdf

ASIA TENGGARA: MENGHUBUNGKAN RAKYAT MELAWAN INVESTASI DAN INISIATIF KONSERVASI SKALA-BESAR



Investasi dan inisiatif konservasi iklim skala besar merusak hutan dan wilayah-kelola-rakyat

Pertumbuhan cepat ekonomi dan industrialisasi Asia datang dengan ongkos yang mahal sekali bagi komunitas setempat, lingkungan hidup dan ekonomi mereka. Di seluruh wilayah, 'pembangunan' dicirikan dengan investasi skala-besar, yang berintikan penguasaan dan eksploitasi tanah, hutan, air, alam, mineral dan tenaga kerja. Pemerintahan-pemerintahan di Asia memburu investasi swasta di hampir setiap sektor ekonomi dari energi, minyak, mineral, pertanian dan pengolahan pangan sampai pendidikan, kesehatan, pariwisata, manufaktur, farmasi, infrastruktur transportasi dan perkotaan. Sumber-sumber investasi beragam, dan umumnya dimungkinkan lewat kesepakatan-kesepakatan bantuan dan ekonomik bilateral, multilateral dan regional, dan seringkali didukung oleh kapital yang sifatnya global dan sulit dilacak. (1)

Tanah, hutan dan air direbut untuk berbagai maksud: pertanian industrial, perkebunan tanaman, PLTA, industri ekstraktif, pariwisata, infrastruktur fisik, pembangunan real estate/properti, Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zones/SEZs*), koridor ekonomik dan sederhananya, untuk laba finansial lewat penciptaan pasar-pasar baru. Dalam hitungan bulan, bentang alam dan sistem-sistem ekologis dengan keragaman hayati diubah menjadi perkebunan karet, kelapa sawit atau singkong, kota-kota berpagar atau bendungan, di dalamnya wilayah hutan atau lahan basah dapat ditandai sebagai wilayah lindung dan digunakan untuk membangkitkan aliran pendapatan 'hijau'. Penduduk setempat jarang mendapatkan manfaat dari bentang alam yang berubah dan pasar yang baru. Bagi sebagian besar, mereka kehilangan nafkah, rumah, kebudayaan, identitas dan pintu masuk ke simpanan pangan alami; mereka digusur paksa, direlokasi, dan didorong ke dalam rejim buruh murah. (1)

Pemusatan pemilikan tanah sekarang lebih tinggi daripada yang sudah-sudah, di mana banyak dari pemilik tanah adalah elit-elit yang punya tali-temali politik, seperti di Filipina, Kamboja, Republik Demokrasi Laos, Malaysia, Pakistan, India dan Indonesia. Dalam 10 sampai 15 tahun terakhir, pemerintahan di seluruh Asia telah melangkah dengan sederet perubahan legislatif untuk menghilangkan sedikit perlindungan yang petani dan nelayan skala kecil, masyarakat asli dan penghuni hutan biasanya peroleh, membiarkan mereka rentan terhadap pengambil-alihan tanah oleh negara dan korporasi untuk pertanian industrial, industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, dan 'koridor-koridor ekonomik'. (2) Perubahan-perubahannya berbeda antar negara, tetapi kesemuanya dirancang untuk memudahkan perusahaan memperoleh tanah-tanah luas yang digunakan komunitas-komunitas setempat dan mengeruk kayu, mineral, air dan kekayaan alam lainnya dengan kendali aturan yang minim.

Banyak perumus kebijakan berdalih bahwa penguasaan tanah oleh negara itu penting untuk menjamin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dan India menerbitkan undang-undang yang memperbolehkan penguasaan tanah untuk proyek-proyek raksasa menggunakan pembenaran pembangunan nasional dan kepentingan umum. Di Thailand, Rencana Induk Perhutanan (*Forestry Master Plan/FMP*) merupakan yang terbaru dari sederet panjang usaha untuk memperluas perkebunan tanaman monokultur di negara tersebut. Diresmikan di bulan Juni 2014 oleh Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Operations Command*) Thailand dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, FMP memberi ijin konsesi bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk perkebunan tanaman di wilayah hutan, menempatkan komunitas yang tinggal dan bertani di hutan tersebut pada risiko penggusuran paksa. (3) Pemerintah Kamboja mengubah tanah publik negara menjadi tanah swasta negara dan memperlakukan hutan komunitas sebagai "hutan rusak" sekehendak hati untuk memberi konsesi ekonomik jangka panjang pada korporasi di tanah-tanah ini.

Perluasan perkebunan tanaman monokultur akan diperparah oleh dana-dana baru untuk memicu investasi swasta dalam apa yang disebut sebagai pertanian "deforestasi-nol". Pengumuman terbaru dicanangkan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Januari 2017. Dana sampai dengan 400 juta dolar dijanjikan oleh pemerintah Norwegia dan korporasi dunia seperti Carrefour, Marks & Spencer, Mars, Metro, Nestlé, Tesco dan Unilever. Dana yang dijanjikan diaku akan memicu lebih jauh investasi sektor swasta skala besar dalam penggunaan tanah secara komersial dalam cara-cara yang juga melindungi dan meulihkan hutan dan lahan gambut. (4)

Bagaimanapun, belajar dari pengalaman akan program-program serupa yang pernah diterapkan di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan Kamboja, dana-dana tersebut boleh jadi akan mendorong skema-skema pertanian kontrak (*contract-farming/out-grower scheme*) yang menjebak petani skala-kecil untuk menggunakan tanah mereka bagi perluasan perkebunan tanaman industri. Skema-skema pertanian-kontrak semacam itu cenderung membebankan semua risiko pada petani skala-kecil sementara memberikan pada korporasi kendali de-facto atas tanah-tanah petani. Skema-skema tersebut juga memungkinkan industri pangan global untuk menyembunyikan perluasan kontrol korporasi atas tanah-tanah pertanian di balik kedok 'tanggung-jawab sosial'. Seringkali, pemerintahan menciptakan jalur kredit bank khusus

untuk petani dalam skema tani-kontrak macam begini, membantu hutang untuk pembelian bibit, pupuk, dsb., dengan demikian mensubsidi inisiatif-inisiatif korporasi tersebut sebagai reaksi atas kritik terhadap kurangnya tindakan untuk mengurangi dampak dari pertanian industrial pada perubahan iklim. Bukti yang dihimpun dari lapangan sejauh ini menunjukkan bahwa skema-skema investasi swasta ini sedikit sekali berbuat untuk menghentikan deforestasi atau mengurangi penggunaan sumber terbesar emisi gas rumah-kaca dari produksi tanaman, yaitu penggunaan pupuk nitrogen. Di banyak proyek-proyek yang ditemukan di Vietnam tengah misalnya, petani bahkan diwajibkan dan dipasok dengan pupuk nitrogen oleh perusahaan Norwegia Yara, satu dari korporasi kunci di balik Visi Baru untuk Pertanian dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan sebuah perusahaan terkemuka dalam Aliansi untuk Pertanian Tanggap Iklim (*Alliance for Climate Smart Agriculture*). (5)

Sementara itu, pertanian tradisional seperti yang dipraktikkan oleh kaum tani dan petani skala-kecil terus menghadapi banyak tantangan. Misalnya di RDR Laos, pertanian berpindah dipandang oleh perumus kebijakan sebagai sebab utama deforestasi. Sebagai contoh, di 1990an, pemerintahan Laos memulai Program Alokasi Tanah dan Hutan (*Land and Forest Allocation Programme/LFAP*) yang melarang perladangan berpindah dan mewajibkan bagaimana berbagai jenis tanah seharusnya dikelola. Kajian-kajian menunjukkan bahwa berlawanan dengan yang diharapkan, LFAP meningkatkan ketidak-amanan tanah dan pangan, kemiskinan dan migrasi karena tekanan, serta tidak mengurangi deforestasi sebab komunitas lokal bukanlah penyebab deforestasi. (6) Lebih belakangan ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan 'Koridor Konservasi Keragaman Hayati' yang memberikan dasar hukum untuk mengelola apa yang disebut sebagai 'koridor keragaman hayati' dengan 12,8 juta dolar dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Program ADB ini bertujuan merintis 'pengelolaan hutan berkelanjutan' dan menyiapkan negara-negara untuk meraih pembiayaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Perencanaan penggunaan tanah telah dilakukan di 67 desa, mencakup 350.000 hektar hutan di mana pertanian berpindah oleh komunitas lokal telah dilarang. (7)

Perdagangan bebas dan kesepakatan-kesepakatan investasi berperan penting dalam membentuk perundang-undangan serta kebijakan yang melancarkan pencaplokkan tanah dan air untuk investasi skala-besar, deforestasi dan degradasi ekosistem. Keduanya berperan baik secara tidak langsung, dengan mendorong produksi barang ekspor yang terpadu secara vertikal dan terspesialisasi yang menjurus pada perluasan pertambangan perkebunan tanaman-tunggal skala besar, maupun secara langsung dengan mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan hambatan-hambatan bagi investasi asing. (8) Sebagai contoh, di Januari 2016, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meluncurkan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), yang diharapkan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal untuk seluruh wilayah, yang mampu bersaing dengan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global. (9) Untuk melancarkan AEC, pemerintahan-pemerintahan anggota ASEAN telah menanda-tangani sejumlah kesepakatan yang memudahkan jalan masuk bagi investor skala-besar ke tanah, sumber-sumber alam, bahan mentah dan tenaga kerja, serta memberikan perlindungan hukum bagi hak mereka untuk beroperasi dan menciptakan laba. Tidak ada perlindungan serupa bagi penduduk setempat yang kehilangan tanah, hutan, sumber

air dan nafkah untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi lainnya yang dipajang sebagai pembangunan.

Di wilayah Mekong, Program Kerjasama Ekonomi Subwilayah Mekong Raya yang dipimpin ADB (*Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program/GMS*) bertujuan mengubah khasanah kekayaan manusia dan alam dari wilayah Mekong menjadi wilayah perdagangan bebas dan investasi lewat investasi-investasi multi-sektor dalam transportasi (jalan raya, rel kereta, jalur udara dan jalur air), energi, perluasan perkotaan, telekomunikasi, pariwisata, pelayanan perdagangan dan pertanian. Inti dari kerangka strategis GMS adalah pembangunan koridor-koridor ekonomi, yang merupakan kantung-kantung investasi besar dalam infrastruktur. Beberapa koridor ekonomi disertai dengan 'koridor-koridor konservasi keragaman hayati,' seperti di Laos, Kamboja dan Vietnam. 'Koridor-koridor konservasi keragaman hayati' ini meliputi dua juta hektar wilayah hutan dan bukan hutan dan berfungsi sebagai komponen 'hijau' dari investasi infrastruktur. Strategi pertanian GMS menekankan pepaduan petani subsisten di wilayah tersebut ke dalam rerantai -pasokan regional/global yang dikendalikan oleh korporasi-korporasi usaha-tani dan mengalihkan produksi pertanian dari swa-sembada menuju pengumpulan bagi pasar regional dan global.

Terlepas dari retorika pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, model pembangunan yang dipromosikan dan didukung oleh pemerintah, donor dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional makin berwatak mengeruk, dan menyuburkan ketimpangan dan ketidak-adilan. Model ini mencaplok unsur-unsur alam, potensi manusia dan bahan mentah untuk penciptaan laba oleh korporasi, dan merusak sistem-sistem-ekologis, komunitas dan peluang bagi kehidupan yang bermartabat. Kekerasan melawan manusia dan alam adalah bagian tak terpisahkan dari model ini. Tak mengherankan bahwa di seluruh Asia, penduduk setempat melawan pembangunan macam itu. Mereka menghadapi risiko politik dan keamanan tak terperi untuk mempertahankan tanah, air dan hutan serta sistem-sistem ekologis mereka melawan kapital pemangsa yang menyulut ekstraktivisme.

Shalmali Guttal, Direktur, Focus on the Global South

Kartini Samon, GRAIN

(1) Shalmali Guttal. Introduction: Redefining Governance; Challenging Markets in *Keeping Land Local: Reclaiming Governance from the Market*. October 2014.

<http://focusweb.org/landstruggles>

(2) GRAIN. Asia's agrarian reform in reverse: laws taking land out of small farmers' hand. April 2015. <https://www.grain.org/article/entries/5195-asia-s-agrarian-reform-in-reverse-laws-taking-land-out-of-small-farmers-hands>

(3) WRM. Thailand's new forestry master plan: same old strategy dressed up in new clothes. Buletin *World Rainforest Movement* Terbitan N° 208 Nopember 2014.

<http://wrm.org.uy/bulletins/issue-208/>

(4) World Economic Forum. \$400 Million Fund Launched in Davos to Stop Tropical Deforestation and Boost Farming. January 2017.

<https://www.weforum.org/press/2017/01/400-million-fund-launched-in-davos-to-stop-tropical-deforestation-and-boost-farming/>

(5) GRAIN. Grow-ing disaster: The Fortune 500 goes farming. December 2016. <https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-fortune-500-goes-farming>

(6) Untuk informasi lebih lanjut, lihat misalnya Shalmali Guttal, *Whose Lands Whose Resources?* In *Development*, 2011, 54(1), (91–97) 2011 Society for International Development 1011-6370/11 www.sidint.net/development/

(7) Asian Development Bank. ADB Grant Assistance to Support Sustainable Biodiversity Management. October 2016. <https://www.adb.org/news/adb-grant-assistance-support-sustainable-biodiversity-management>

(8) Lorenzo Cotula. Tackling the trade law dimension of land grabbing. International Institute for Environment and Development, 14 November 2013. <http://www.iied.org/tackling-trade-law-dimension-land-grabbing>
<http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/755/about-aec.html>



Konflik Hutan di Thailand: Negara vs. Rakyat

Politik hutan modern di Thailand telah melewati banyak tahapan. Di abad ke 19, orang Inggris mulai menebangi hutan untuk mendapatkan kayu jati. Di abad ke 20, para penebang hutan lainnya kemudian mengambil alih. Badan-badan negara resah untuk menutup hutan bagi gerakan-gerakan perlawanan sementara mendorong pertanian komersial dan bendungan-bendungan PLTA serta pengerukan kayu. Di 1989, ketika hutan Thailand yang tadinya luas telah sangat mengerut, penebangan hutan secara resmi dilarang.

Di era berikutnya yang makin menekankan "konservasi hutan" dan "penghutanan kembali", wilayah hutan terus mengecil, dan konflik telah meningkat di antara pemerintah dan warga setempat.

Konflik-konflik tersebut berakar sebagian di hak berkekuatan hukum dan dipertahankan mati-matian dari Departemen Perhutanan Kerajaan Thailand atas wilayah-wilayah luas yang berhutan maupun yang tidak berhutan. Lebih dari 11.000 komunitas di seluruh negeri tinggal di tanah yang secara resmi dimiliki negara, yang meliputi 57 persen luas wilayah negara. Di samping itu, meskipun Departemen Pertanian Thailand telah menerbitkan berbagai surat tanah pribadi untuk lebih dari 20 juta hektar dari luas lahan Thailand sebesar 51 juta hektar, termasuk sebagian besar wilayah hutan negara, 90 persen dari hak atas tanah ini berada di tangan kurang dari 10 persen penduduk. Setidaknya 38 persen dari tanah milik pribadi, dan mungkin lebih besar lagi, tidak dimanfaatkan. Hal itu menyebabkan konflik tak terelakkan: bukan saja sekitar 1,5 juta keluarga harus menyewa tanah untuk bertani, tetapi lebih dari 800.000 keluarga tani tidak memiliki tanah sama-sekali.

Sementara itu, Undang-Undang Penghutanan-Kembali 1993 (*Re-Afforestation Act*) telah mensahkan pengambil-alihan sebagian besar tanah negara yang digunakan komunitas untuk pertanian bagi perkebunan tanaman yang tumbuh cepat. Dan sekarang negara tengah menyiapkan sebuah dalih lain untuk menggusur rakyat dari kawasan hutan negara. Dalih ini adalah bahwa warga desa menyebabkan pemanasan global lewat permukiman mereka. Artikel ini membahas beberapa konflik di dua propinsi di Thailand Utara -- Phetchabun dan Chaiyaphum -- di mana tindakan konsersasi hutan resmi telah merambah permukiman warga.

Phetchabun

Huay Rahong, sebuah desa berpenduduk lebih dari 1.200 jiwa di Propinsi Phetchabun, Thailand Utara, telah berdiri sejak 1971. Sebagian besar warga yang tinggal di Huay Rahong sekarang digusur dari desa mereka yang bernama Sambon ketika pemerintah mendirikan Taman Nasional Nam Nao di 1971. Sebuah desa di dekatnya, Huay Khonta, yang jauh lebih kecil berdiri di tahun 1963.

Pada tanggal 26 Nopember 1999, pemerintah menciptakan sebuah suaka margasatwa yang dinamakan Phu Pa Daeng (Pegunungan Tebing Merah/*Red Cliff Mountain*) di tanah yang tumpang tindih dengan permukiman mereka dan hutan disekelilingnya, dan menjelaskan niat untuk menggusur warga. Penduduk desa kecil Huay Waai yang bersebelahan dengan Huay Rahong telah terampas tempat tinggalnya tanpa ganti rugi atau tanah permukiman kembali. Pejabat-pejabat Taman Nasional telah menipu keluarga-keluarga di situ agar pergi dengan menjanjikan kompensasi jika mereka meninggalkan desanya. Janji tersebut, bagaimanapun, tidak punya kekuatan hukum sebab warga desa tidak memiliki surat tanah dan dilakukan sekedar untuk menjebak warga untuk pergi.

Huay Khonta juga terus-menerus berada di bawah ancaman. Di 2005, ketika 13 warga (termasuk kanak-kanak dan warga difabel) disewa oleh seorang tetangga untuk memanen jagung di ladang yang terletak di dalam kawasan suaka margasatwa, kepala suaka menjatuhkan denda atas tindak pidana perambahan. Hakim menolak kasus tuntutan tersebut, mengemukakan bahwa status dari petak kecil tanah yang dipersoalkan (kurang dari satu setengah hektar) tidak jelas. Meskipun begitu, vonis hakim tersebut dibalik oleh Pengadilan Tinggi, mengakibatkan vonis enam-bulan penjara (ditunda

untuk dua tahun). Mahkamah Agung kemudian mengokohkan keputusan Pengadilan Tinggi.

Warga Huay Khonta juga menghadapi tuntutan perdata yang diajukan oleh Departemen Taman Nasional karena "menyebabkan pemanasan global" di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup 1992, yang menyatakan pencemar menanggung kerusakan. Biasanya diterapkan pada industri-industri pencemar, Undang-Undang tersebut baru-baru ini telah diadaptasi untuk digunakan sebagai senjata melawan warga pedesaan miskin dengan bantuan para akademisi kontrakan, yang telah keluar dengan rumusan bahwa petani Huay Khonta dapat didenda sebesar 26.250 dolar per hektar untuk "menyebabkan" kenaikan suhu, erosi, pemiskinan hara tanah dan kerusakan hidrologis. Secara keseluruhan, warga desa setempat secara teoretis harus membayar 70.000 dolar dalam denda kerusakan, sebuah jumlah yang besar bagi standard setempat. Dalam peristiwa tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016, pengadilan mendenda para terdakwa Huay Khonta sebesar 3.562 dolar per hektar, ditambah bunga tahunan 7,5 persen mulai dari 2005.

Warga desa terus menentang apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan hukum. Mereka bukan saja telah mendaftarkan tuntutan naik-banding dengan pengadilan. Mereka juga telah menyerahkan sebuah usulan kreatif untuk sejenis "sertifikat tanah komunitas", yang mereka percayai bisa memecahkan masalah secara damai dalam jangka panjang. Pemilikan tanah komunal akan mengurangi risiko tanah dijual atau keluarga-keluarga dipaksa menyerahkan tanah dalam cara-cara yang bisa terjadi bila tanah didaftarkan di bawah sertifikat tanah pribadi. Usulan tersebut mengajukan garis-besar dari sebuah proses bagi komunitas untuk merumuskan peraturan-peraturan dan sebuah panitia yang dipimpin oleh komunitas untuk mengurus pengelolaan tanah. Di samping itu, pemasukan dari penggunaan tanah oleh komunitas akan berkontribusi pada sebuah "Dana Tanah" yang akan menunjang warga komunitas yang membutuhkannya.

Chaiyaphum

Konflik atas proyek perkebunan tanaman Khonsarn di propinsi Chaiyaphum bermula dari 1978, ketika Departemen Perhutanan Kerajaan memberikan ijin pada Organisasi Industri Perhutanan (*Forest Industry Organisation/FIO*) untuk menanam eucalyptus di wilayah yang tumpang-tindih dengan ladang-ladang rakyat.

FIO, sebuah perusahaan negara di bawah Kementerian Pertanian dan Koperasi, didirikan di 1947 setelah habisnya konsesi yang telah diberikan pada perusahaan-perusahaan penebangan kayu asing. Dulu, tugasnya adalah mengekstraksi kayu dengan syarat perusahaan tersebut harus menanam kembali wilayah tebangan.

Hal ini ternyata menjadi masalah di Chaiyaphum, di mana berbagai wilayah pegunungan yang telah ditebangi masih menjadi basis Partai Komunis Thailand (CPT) sampai dengan akhir 1970an. Tidak berani menginjakkan kaki di sana, FIO mengusulkan untuk menanam kembali di wilayah yang lebih rendah letaknya, termasuk di Hutan Lindung Nasional Phu Sampak Nam yang didirikan di 1973, yang sebagiannya menjadi suaka margasatwa di 2000.

Perkebunan eucalyptus seharusnya mencakup 3.200 hektar. Hanya 704 hektar yang nyatanya ditanami karena perlawanan dari para pengguna tanah, tetapi FIO terus mencoba sampai 1986 untuk menggusur masyarakat setempat, menggunakan baik peralatan hukum dan mafia lokal untuk menekan mereka. Strategi lainnya adalah usulan "desa hutan" di mana FIO akan mengalokasikan tanah kurang dari satu hektar untuk keluarga peserta bagi rumah dan sedikit tanah pertanian. Tetapi hanya 40 keluarga dari 102 keluarga yang tinggal di zona sengketa yang akhirnya berpartisipasi.

Di 2004, sekitar 277 rumah-tangga yang terkena dampak proyek FIO berhimpun sebagai sebuah jejaring dan menuntut agar pemerintah membatalkan perkebunan dan membagikan tanah kepada komunitas. Mereka mengusulkan bahwa pemerintah menerbitkan sertifikat tanah komunal bagi komunitas dan menerima bahwa komunitas mempunyai hak untuk mendirikan dan mengelola lahan hutan milik komunitas sendiri. Mereka juga mengusulkan sebuah petak kecil tanah diberikan kepada setiap rumah-tangga yang berpartisipasi untuk membangun rumah dan produksi pangan dan juga sebuah hutan komunitas, tanah pertanian komunal dan tanah bagi penggunaan umum atau komunitas. Sejauh ini, sayangnya, pemerintah bersikap tidak tanggap.

Di 2009, warga desa setempat menguasai kembali sekitar 15 hektar tanah yang ditanami eucalyptus oleh FIO di 2004, menggolongkannya kembali ke dalam empat kategori penggunaan sendiri: tanah tempat tinggal dan pertanian rumah-tangga, tanah komunal, hutan komunitas, dan tanah untuk pelayanan umum seperti jalan raya. FIO melawan balik dengan menuntut 31 orang di pengadilan perdata, yang menghasilkan perintah agar para terdakwa dan anggota keluarganya meninggalkan wilayah tersebut. Sejauh ini, warga desa telah menolak patuh pada keputusan tersebut.

Di tahun 2014, militer Thailand mengambil alih kekuasaan, membentuk Dewan Pemelihara Perdamaian Nasional (*National Peace Keeping Council/NPKC*). Kebijakan reklamasi hutan NPKC, yang bertujuan meningkatkan tutupan hutan di Thailand menjadi 40 persen, telah dimanfaatkan oleh pemerintah propinsi Chaiyaphum sebagai dasar untuk memerintahkan warga desa Bo Kaew di wilayah perkebunan FIO untuk membongkar desa mereka dalam 30 hari. Meskipun begitu, dengan alasan bahwa NPKC juga telah berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan nafkah dari petani miskin, penduduk Bo Kaew sejauh ini menentang perintah penggusuran tersebut.

Pada bulan April 2016, seorang pemimpin setempat, Den Khamlae, menghilang ketika mengumpulkan pangan di sebuah wilayah di dekat rumahnya dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Den telah bicara lantang mempertahankan sikap bahwa "kami orang miskin tidak ingin dihukum dan menjadi tunawisma serta terpinggirkan di negeri kami sendiri." Meskipun warga setempat dan polisi menemukan lokasi-lokasi bekas terbakar serta pecahan-pecahan tulang di wilayah di antara hutan komunitas desa dengan wilayah konservasi negara di mana Den menghilang, tidak ada kemajuan yang dilaporkan dalam investigasi kasus tersebut.

Menuju Masa Depan

Di bawah rejim yang berkuasa di Thailand sekarang, warga negara mempunyai lebih banyak alasan daripada yang sudah-sudah untuk mencemaskan ahwa tanah dan hutan

World Rainforest Movement

mereka akan dirampas dan diserahkan kepada bisnis besar dan kelompok-kelompok lain yang bersedia berbagi hasil dengan pihak militer.

Setidaknya, sebuah jejaring masyarakat sipil yang mencakup komunitas-komunitas di seluruh Thailand yang menghadapi masalah-masalah serupa dengan yang menghadang warga desa di Phetchabun dan Chaiyaphum telah mencatat beberapa kemajuan dalam menuntut diloloskannya empat buah legislasi baru: sebuah Undang-Undang Hak Tanah Komunitas; sebuah Undang-Undang Dana Bank Tanah; sebuah Undang-Undang Dana Keadilan; dan sebuah Undang-Undang Pajak Progresif yang akan menarik pajak lebih tinggi dari pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya.

Keempat usulan legislatif tersebut akan, apabila lolos, membantu memecahkan sengketa-sengketa tanah dan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan tanah. Keempatnya juga bahkan menerima dengar pendapat yang bersimpati dari pihak pemerintah, dengan pengecualian Undang-Undang Hak Tanah Komunitas. Menyangkut hak-hak komunitas atas tanah, pemerintah lebih memilih usulan-usulannya sendiri yang lebih terbatas, yang melibatkan pengelolaan tanah oleh koperasi dan tak akan mengakui hak-hak komunitas dalam taman-taman nasional atau suaka margasatwa.

Oranuch Phonpinyo ([lumnampasak5748\(at\)gmail.com](mailto:lumnampasak5748(at)gmail.com))

Jejaring Reforma Tanah Timur-laut-Thailand (*The Northeastern Land Reform Network – Thailand*)

Untuk informasi lebih jauh:

(1) The Land Institute Foundation of Thailand

(2) Thai Civil Rights and Investigative Journalism:
<http://prachatai.org/english/category/news>

(3) *Prachatai News*, 17 May 2013: <http://prachatai.com/journal/2013/05/46764>



Myanmar: Kebijakan baru mengangkat hak-hak asli yang terancam

Dua tahun belakangan merupakan masa perubahan penting di Myanmar, terutama sekali dengan kemenangan NLD (1) di pemilihan umum bulan Nopember 2015. Jauh lebih sedikit diberitakan di luar Myanmar, tetapi tentu sama pentingnya adalah pengumuman di Januari 2016 dari sebuah Kebijakan Penggunaan Tanah Nasional (*National Land Use Policy/NLUP*) di Myanmar. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari inisiatif kebijakan utama yang terakhir dari pemerintahan yang berakhir sebelum kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan NLD yang baru di bulan April 2016. Kebijakan itu sendiri adalah hasil dari konsultasi selama setahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dan proses pengkajian yang sebagian besar diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi dan Perhutanan terdahulu di bawah dukungan sebuah badan lintas-kementerian yang dibentuk oleh wakil presiden. Berlainan dengan pengembangan kebijakan lainnya, NLUP tercatat sebagai mencakup setidaknya 91 konsultasi publik termasuk 17 konsultasi yang dipimpin oleh pemerintah, dan setidaknya 74 yang dipimpin oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil di lebih dari 40 kota dan mencakup 4 lokakarya konsultasi level nasional. (2) Kebijakan tersebut dibayangkan bisa berperan sebagai sebuah kokumen pemandu dalam penyusunan draft sebuah Undang-Undang Tanah Nasional dan dalam memperbarui undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Perolehan Tanah 1894 yang ketinggalan jaman, dan Undang-Undang Pengelolaan Tanah Kosong, Bera dan Belum Dimanfaatkan yang merupakan perundang-undangan utama yang memudahkan pemberian tanah-tanah adat etnis ke investor.

Dokumen yang dihasilkan sebagian besar merupakan dokumen kompromi yang mengandung 13 bagian kunci yang mencakup kebijakan pemerintah di berbagai tema. Ini termasuk bidang yang luas seperti administrasi penggunaan tanah, dan perencanaan penggunaan tanah, sampai ke bagian-bagian lebih khusus yang berpusat pada pemberian konsesi dari tanah-tanah milik negara; prosedur yang menyangkut perolehan tanah pemukiman kembali sebagai kompensasi; perpajakan; pemantauan dan evaluasi tanah, dan juga, yang penting, hak-hak penggunaan tanah dari warga kebangsaan-kebangsaan etnis; dan hak setara dari laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut telah dikritik oleh beberapa aktivis tanah karena tidak cukup jauh menghentikan konsesi-konsesi tanah serta investasi yang menyangkut tanah. Kebijakan tersebut, bagaimanapun, patut dicatat dalam arti bahwa dia menawarkan pembaruan penting dalam pengurusan tanah yang mencoba mengatur, membatasi dan menyarankan pemecahan kebijakan untuk banyak konflik yang menyangkut tanah, termasuk perampasan tanah dan pengasingan tanah

lewat konsesi serta persewaan tanah negara di tanah-tanah tradisional dari berbagai kelompok etnis. Nyatanya bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah pergeseran penting dari kerangka pengurusan tanah Myanmar yang selama ini bersifat turun dari atas. Pengakuan kuat atas kuasa tanah adat, jika diterapkan dalam undang-undang, akan menempatkan Myanmar terpisah dari beberapa tetangga otoriter di Vietnam, Kamboja dan Laos.

Kebijakan itu sendiri patut dicatat karena mengandung beberapa asas dasar: "Untuk mengakui dan melindungi secara hukum hak-hak kuasa tanah dari rakyat, sebagaimana diakui oleh komunitas setempat, dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan seperti petani gurem, orang miskin, warga kebangsaan etnis dan perempuan." Paling mencolok, NLUP bersifat penting karena untuk pertama kalinya ia bertujuan mengakui dan melindungi akuan kuasa tanah adat maupun komunal. Dalam hal ini, Bagian 8 tentang Hak-Hak Penggunaan Tanah bagi Kebangsaan Etnis merupakan bagian terpenting yang seluruhnya ditujukan bagi pengakuan dan perlindungan penguasaan tanah adat dari kelompok-kelompok etnis di Myanmar. Pasal 64 menyebutkan bahwa "Sistem-sistem kuasa tata-guna tanah adat akan diakui di Undang-Undang Tanah Nasional untuk menjamin kesadaran, ketaatan dan penerapan praktik-praktik penggunaan tanah dari kebangsaan-kebangsaan etnis, pengakuan resmi atas hak-hak penggunaan tanah adat, perlindungan hak-hak ini dan penerapan dari mekanisme-mekanisme yang telah ada untuk resolusi sengketa secara utuh."

Bagian hak-hak tanah Etnis berlanjut dalam semangat yang sama. Dalam 11 pasalnya, ia mengakui praktik-praktik pengelolaan tanah adat; melindungi tanah-tanah etnis dari pembagian untuk konsesi; mengakui dan melindungi sistem-sistem perladangan berpindah rotasional; mengakui kebutuhan akan partisipasi nyata dari kebangsaan-kebangsaan etnis untuk keputusan-keputusan yang menyangkut tanah-tanah mereka; mengakui pentingnya prosedur-prosedur resolusi seketa tanah adat; dan meletakkan asas-asas dasar untuk memecahkan konflik-konflik tanah menyejarah dan rakyat yang terpindahkan secara paksa. Jika diterapkan, perubahan-perubahan ini akan menunjukkan sebuah perubahan monumental dari pengurusan tanah-tanah tradisional di Myanmar yang saat ini bersifat turun dari atas.

Yang penting, Bagian 9 dari NLUP mengandung sebuah bab yang secara khusus berfokus pada hak-hak setara dari laki-laki dan perempuan yang dicantumkan setelah secara sengit disanggah dan dengan pendekatan dari kelompok-kelompok kesetaraan *gender* lokal di Myanmar. Soal ini benar-benar nyata dalam kaitan dengan tanah yang umumnya dilihat sebagai wilayah laki-laki, dan dimana dianggap biasa bahwa perempuan tidak dicantumkan dalam dokumen-dokumen pendaftaran tanah. (3) Bagian 9 dari NLUP tidak panjang, mencakup hanya dua pasal. Tetapi pasal 75 menjelaskan 8 hak-hak kuasa tanah khusus yang seharusnya diberikan pada perempuan. Ini mencakup hak untuk memiliki properti seagai pribadi atau pemilik hak-tanah-gabungan; hak atas tanah ketika pasangan meninggal, atau ketika properti dibagi dalam kasus perceraian; dan hak untuk turut serta dan mewakili komunitas ketika mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut tanah.

NLUP 2016 tampaknya menunjukkan perubahan arah yang penting bagi Myanmar menuju sebuah sistem pengurusan tanah yang demokratis dan partisipatif dan

menghargai hak-hak komunitas perdesaan dan etnis yang telah lama mengeluhkan perampasan-perampasan tanah yang disponsori oleh negara. Bagaimanapun, pada tanggal 11 Nopember 2016, hanya 10 bulan setelah NLUP diremikan, sebuah panitia yang tidak jelas tetapi berkuasa di Parlemen Nasional, dikenal sebagai *Komisi Khusus untuk Analisis Soal-Soal Hukum dan Khusus* (selanjutnya disebut sebagai Komisi Khusus) menyampaikan sebuah memo ke Parlemen. Memo tersebut, setelah mengacu pada Pasal 37 dari konstitusi 2008 - yang dirancang oleh pihak militer dan menyatakan bahwa Negara adalah pemilik awal dari semua sumber alam di atas dan di bawah tanah - menyatakan bahwa NLUP mencakup 6 "fakta-fakta yang tidak pas dan tidak relevan" dan karenanya harus dihapus dari dokumen dan seperangkat 6 hal yang menyangkut hal tersebut "akan harus ditambahkan".

Sejalan dengan sifat yang terang-terangan merahasiakan diri dari Komisi Khusus tersebut, (4) memo tersebut tidak diumumkan terbuka meskipun faktanya ia diserahkan kepada parlemen nasional. Memang, adanya dokumen tersebut hanya diketahui oleh kalangan pembaruan tanah lewat sebuah kutipan di koran lokal berbahasa Inggris *The Myanmar Times* beberapa pekan kemudian, yang memicu investigasi lebih lanjut oleh badan-badan donor. Dokumen tersebut ditanda-tangani oleh U Shwe Mann, Ketua Komisi, dan seorang dengan kekuatan politik yang penting di pemerintah. Seorang jenderal pensiunan, Ketua dari Partai USDP yang sebelumnya memerintah, dan juru-bicara majelis rendah dari parlemen nasional di bawah kepresidenan sebelumnya, U Shwe Mann dan keluarganya memelihara kepentingan ekonomik yang penting di seluruh negeri, termasuk dalam investasi-investasi usaha-pertanian. (5) Yang penting, U Shwe Mann secara luas dianggap sebagai sekutu dekat dari pemimpin NLD dan Anggota Dewan Negara Daw Aung San Suu Kyi. Memang, telah dilaporkan secara meluas di pers di 2015 bahwa U Shwe Mann disingkirkan dari partai politik USDP karena terlalu dekat dengan pemimpin NLD. U Shwe Mann, sementara kehilangan kursi di pemilihan umum 2015, setidaknya ditempatkan oleh Dewan Negara di Komisi Khusus, yang dibaca sebagian orang sebagai balas jasa untuk mendukung Daw Suu Kyi dalam mencoba melakukan pembaruan konstitusi di badan legislatif sebelumnya. (6)

Melihat keenam butir pasal yang dideretkan sebagai "fakta-fakta yang tidak pas dan tidak relevan dan harus dibuang", butir pertama dan terakhir barangkali paling tidak kontroversial, mengacu pada pembentukan sebuah badan pengelolaan informasi tanah, dan untuk menghapus acuan untuk menyelenggarakan pengkajian ulang setiap 5 tahun dari dokumen kebijakan tersebut. Butir pertama dikutip dalam memo yang mengacu pada Pasal 18 NLUP yang menyiratkan sebuah badan "yang ditujukan" untuk pengelolaan informasi tanah di seluruh negeri. Komisi Khusus tersebut, dalam memberikan saran menentang adanya badan serupa itu, telah gagal memahami bahwa badan tersebut sudah ada dalam bentuk proyek *Myanmar Satu Peta* yang bertujuan mengkonsolidasikan data spasial yang berkaitan dengan tanah serta informasi lintas kementerian. (7) Tentang butir yang terakhir, Komisi Khusus menuduh bahwa pembaruan berkala dari kebijakatan tersebut akan memerlukan pembaruan berkala dari Undang-Undang dan bahwa hal itu tak mungkin dilaksanakan, meskipun alasan-alasan untuk pendapat tersebut tidak disebutkan. Menimbang pentingnya kebijakan pertanahan dan situasi yang tengah berubah di Myanmar, tampaknya sepenuhnya masuk akal untuk mengkaji ulang baik kebijakan dan Undang-Undang pertanahan setiap 5 tahun.

Soal kedua yang ditandai untuk dihilangkan oleh Komisi Khusus menyangkut meniadakan acuan pada pendirian sebuah pengadilan khusus dan proses arbitrase tripartit independen untuk resolusi sengketa tanah. Sistem pengaduan independen tersebut diusulkan dalam Pasal 42 NLUP justru karena kerangka hukum yang ada telah terbukti tidak memadai untuk memecahkan banyak sengketa tanah. Tidak ada pengakuan tanah-tanah komunitas komunal, pemilikan tanah adat atau perladangan berpindah dalam kerangka hukum yang ada, dan nyatanya, Undang-Undang 2012 tentang Pengelolaan Tanah Kosong, Bera dan Belum Dimanfaatkan tersebut di atas sekarang mengesahkan pemberian tanah komunal tradisional dan tanah-tanah bera kepada investor swasta. Dengan memandatkan penghapusan badan arbitrase independen (yang bahkan belum didirikan), Komisi Khusus tampaknya telah memberikan sinyal yang jelas bahwa status quo dari hegemoni tanah negara harus berlanjut.

Soal ketiga yang disebutkan untuk dihilangkan oleh Komisi Khusus barangkali merupakan yang paling memprihatinkan: penghilangan Bagian 8 tentang hak-hak tanah dari kebangsaan etnis seluruhnya! Seperti diuraikan di atas, Bagian 8 adalah bab utama dalam NLUP yang memberikan pedoman nyata mengenai memberikan keamanan penguasaan tanah atas sistem-sistem pemilikan tanah informal dan pengaturan penguasaan tanah komunal tradisional serta sistem pengelolaan sumber alam yang saat ini mendominasi pengurusan tanah untuk kebangsaan-kebangsaan etnis di Myanmar, terutama untuk mereka di wilayah pegunungan tinggi dari Myanmar. Yang mencengangkan, Komisi Khusus membenarkan penghapusan Bagian 8 atas dasar bahwa legislasi yang ada (khususnya Undang-Undang Tanah dan Pendapatan; Undang-Undang Kota dan Desa, Undang-Undang Pengelolaan Tanah Kosong Bera dan Belum Dimanfaatkan, Undang-Undang Tanah Pertanian dan Undang-Undang Perhutanan) telah menghormati hak-hak adati dan bahwa hak-hak ini nyatanya dikelola oleh departemen-departemen sektoral yang bersangkutan. Walaupun begitu, istilah "adat" dan "tradisional" tidak muncul sekalipun baik di Undang-Undang Perhutanan (1992), Undang-Undang Tanah Pertanian (2012), atau Undang-Undang Pengelolaan Tanah Kosong, Bera dan Belum dimanfaatkan (VFV) (2012). Lebih-lebih, Undang-Undang VFV dikritik oleh banyak kelompok hak-hak etnis sebagai satu dari cara utama di mana Negara Myanmar saat ini melancarkan pengalihan tanah dan sumber-sumber alam etnis tradisional kepada investor-investor swasta untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan. Hal ini telah menjadi sebuah sumber sengketa terkemuka di antara Pemerintahan Persatuan Myanmar dan kelompok-kelompok etnis. Lebih jauh, bab 8 adalah satu-satunya bagian dalam NLUP yang secara khusus meminta Undang-Undang Tanah untuk mengakui penguasaan tanah adat, dan untuk menyediakan sarana untuk mendaftarkan pengaturan-pengaturan penguasaan tanah adat yang ada dalam Undang-Undang. Penghapusan bab 8 akan sangat melemahkan pengaturan penguasaan tanah tradisional dari warga kebangsaan etnis karena gagal mempertimbangkan peri kehidupan serta sistem-sistem pengurusan tanah mereka.

Perlindungan dan pengakuan perladangan berpindah juga menjadi sasaran untuk dihapus oleh Komisi Khusus, yang menyatakan bahwa sistem pertanian tradisional yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok etnis dataran tinggi "memperburuk lingkungan alam". Komisi Khusus mendorong agar sistem tersebut "digantikan dengan praktik pertanian maju seperti pertanian dataran tinggi, perladangan berteras, tanihutan". Meminta penghapusan acuan apapun pada perlindungan terhadap sistem tani-hutan

tradisional ini menerangi kelemahan yang mendasarinya dalam memahami kerumitan pengaturan-pengaturan penguasaan tanah di wilayah perdesaan negeri. Penghapusan itu juga tampaknya bertujuan memelihara kebijakan pembasmian perladangan berpindah yang ada dan telah gagal, baik di Myanmar, maupun di wilayah yang lebih luas. Sumber nafkah dari kehidupan kebangsaan-kebangsaan etnis, khususnya, di dataran tinggi Myanmar pada saat ini sangat rentan karena situasi penguasaan tanah di wilayah-wilayah tersebut yang sangat tidak aman, dan gagal mempertimbangkan sistem-sistem pengelolaan tanah tradisional dan sumber alam mereka. Sistem-sistem tersebut pada saat ini tidak diakui maupun dilindungi dalam perundang-undangan Myanmar, dan dalam hal ini bab 8 NLUP menyediakan panduan menyeluruh bagi pengembangan kerangka pengurusan tanah di masa depan yang menyangkut konteks khas dari kebangsaan-kebangsaan etnis yang tinggal di dataran tinggi dan juga hak-hak pemegang kuasa tanah adat. Tuntutan untuk penghapusan acuan pada perlindungan dan pengakuan sistem-sistem perladangan berpindah dan juga penghapusan Hak-Hak Tanah dari Kebangsaan Etnis boleh jadi akan dilihat sebagai sebuah pengkhianatan penting terhadap sifat terbuka dan partisipatif dari proses konsultasi NLUP selama setahun penuh. Sebagai tambahan, menurut para pengamat Myanmar yang diwawancarai oleh peneliti lapangan WRM, langkah tersebut mengandung risiko penting yang merusak kepercayaan pada organisasi-organisasi masyarakat sipil etnis dan perwakilan-perwakilan kelompok etnis bersenjata yang pada saat ini bekerja dengan pemerintah Myanmar untuk merundingkan sebuah kesepakatan gencatan senjata dan perdamaian nasional bagi konflik hilang-muncul yang telah menodai Myanmar selama 5 sampai 6 dasawarsa belakangan. Lebih-lebih lagi mempertimbangkan bahwa manifesto pemilihan umum NLD yang berkomitmen pada "memecahkan masalah-masalah di antara kelompok-kelompok etnis melalui dialog yang berlandaskan saling hormat". (8)

Seakan-akan meminta penghapusan hak-hak tanah etnis dan acuan kepada perlindungan dan pengakuan perladangan berpindah belum cukup buruk, Komisi Khusus kemudian meminta penghapusan acuan apapun mengenai hak-hak setara dari laki-laki dan perempuan dalam penguasaan tanah, termasuk dalam Bagian 8(a) mengenai asas-asas dasar yang disebutkan di atas, dan kemungkinan juga Bagian 9 tentang "Hak-Hak Setara dari Laki-Laki dan Perempuan". Dalam logika ganjil dari Komisi Khusus, tuntutan untuk penghapusan pertimbangan-pertimbangan tersebut bertumpu pada rasa ketakutan bahwa kesatuan etnis akan terpengaruh mungkin karena kelompok-kelompok etnis ingin melanjutkan pembedaan perempuan dalam soal pemilikan tanah. Tidak ada bukti yang dikemukakan untuk pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut tampaknya lebih didasarkan pada pendapat-pendapat pribadi dari para anggota Komisi Khusus - semuanya laki-laki - daripada bukti-bukti empiris apapun. Nyatanya, sebagaimana berbagai kegiatan di seluruh dunia dalam perayaan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret sekali lagi tekankan, situasi saat ini tentang hak-hak tanah perempuan, termasuk di Myanmar, menunjukkan bahwa ada kebutuhan sungguh-sungguh untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam pengurusan tanah di badan-badan pemerintah, di Myanmar dan di tempat lain.

Menyangkut pernyataan penghapusan butir-butir tersebut di atas, Komisi Khusus kemudian mengemukakan 6 hal rinci yang harus ditambahkan pada kebijakan yang ada. Beberapa darinya menyangkut keja dari berbagai badan-badan administratif dari pemerintahan. Meskipun demikian, nada mencolok dari tambahan yang diusulkan

menyangkut bagaimana memelihara kepentingan usaha dan kemampuan Negara untuk secara tegas menguasai semua tanah bila dibutuhkan. Alasan-alasan tersebut paling jitu terangkum dalam pertimangan yang diambil dari klausul enam dari memo tersebut: "Adapun bagi Negara, pemilik asal dari semua sumber-sumber tanah, apabila diperlukan, mempunyai hak-hak penuh untuk memperoleh dan mengelola tanah untuk kepentingan umum yang harus dimasukkan dalam kebijakan. Mengubah penggunaan tanah dari tanah pertanian ke jenis tanah lain serta monopolisasi tanah menaikan harga tanah secara meluas, dan akibatnya investor dalam negeri dan asing menghadapi tantangan. Karenanya, Pemerintahan Persatuan, Negara Bagian atau Regional perlu mendapatkan tanah dengan membayar kompensasi dengan nilai tetap untuk menggunakan tanah secara efektif dan membuahkan hasil."

Pada saat ini tidak diketahui bagaimana tantangan Komisi Khusus terhadap hasrat pembaruan pertanahan dari mayoritas penduduk yang dikaji dalam sebuah proses meluas sepanjang tahun, akan berkembang. Memo Komisi Khusus tampaknya pelan-pelan menemukan jalannya lewat aparatus pemerintahan. Pertanyaan yang muncul, bagaimanapun, adalah seperti apa dampak dari usaha Pemerintah untuk secara sepihak melangkah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada kepercayaan dan niat baik yang menurut laporan berkembang di antara pemerintah dan warga negara, masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kebangsaan etnis yang ikut ambil bagian dalam proses konsultasi selama setahun mengenai NLUP. Lebih jauh, bukannya langkah tersebut akan dilihat sebagai sebuah tamparan pada wajah dari ikhtiar-ikhtiar yang sedang berkembang di proses konsultasi nasional sekitar perumusan kebijakan dan perundang-undangan? Dari luar, serangan pada NLUP tampak seperti bagian dari sebuah pertempuran yang lebih luas yang berkembang di antara mereka yang haus akan tanah dan pembaruan agraria di satu pihak dan kepentingan-kepentingan usaha kroni yang ingin memelihara status quo di lain pihak.

Adapun yang barangkali paling merisaukan mengenai kasus ini adalah bahwa sebuah badan parlementer yang sebagian besarnya tidak dipilih, tetapi secara misterius berkuasa, tampaknya memaksakan pengaruh penting pada agenda pembaruan pertanahan di Myanmar. Akankah pemerintah Myanmar membolehkan harapan rakyat dimentahkan oleh institusi rahasia macam itu?

Artikel dihimpun oleh Sekretariat WRM berdasarkan informasi dari para peneliti WRM dan informasi yang dikutip di bawah ini

(1) NDL adalah singkatan dari The National League for Democracy (Liga Nasional untuk Demokrasi). Partai ini didirikan di tahun 1988 dan pada saat ini merupakan partai yang berkuasa di Myanmar, dengan Daw Aung San Suu Kyi sebagai Presiden dan Penasihat Negara untuk Myanmar.

(2) Forbes, E., (2017). Civil Society Participation in Land Policy Making: the innovative experience of Myanmar's pre-consultation on the National Land Use Policy. Mekong Regional Land Governance Project. Vientiane and Yangon.

(3) Namati, (2016). Gendered aspects of land rights in Myanmar: Evidence from Paralegal Casework. pp 5-6.

- (4) <http://frontiermyanmar.net/en/law-reform-a-daunting-challenge>
- (5) http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=14151&page=3
- (6) <http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/18853-thura-u-shwe-mann-appointed-to-head-own-legislative-commission.html>
- (7) <https://cdeweb4.unibe.ch/Pages/News/149/OneMap-Myanmar-New-CDE-project-launched.aspx>
- (8) http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf



Hutan di Timur-Laut India

Wilayah ini biasanya disebut sebagai "Timur-Lautnya India" atau juga hanya disebut sebagai "Timur Laut" yang terhubung cukup sulit dengan India daratan oleh jembatan darat selebar kurang-lebih 20 kilometer, dan dikelilingi oleh Nepal, Bhutan, China Myanmar dan Bangladesh. Terdapat lebih dari 200 komunitas asli dan suku yang hidup di wilayah ini, sebagian besar dari mereka berbagi kemiripan dalam kebudayaan, makanan, pakaian, ekonomi dan ujud politik, serta beragam hukum dan institusi yang khas bagi masing-masing suku.

Di tengah naiknya urbanisasi, terutama di ibukota-ibukota, kehidupan komunitas yang sebagian besarnya dibentuk oleh alam berlanjut. Pegunungan, hutan, dan sungai-sungai membentuk hidup mereka. Seiring dengannya, negara dan korporasi-korporasi terus memaksakan agenda 'pembangunan' mereka, lebih-lebih sekarang ketika kapital global dan industri ekstraktif memasuki wilayah-wilayah yang sungguh terpencil. Dalam konteks dari agenda 'pembangunan' yang bergerak maju ini, makna dan penggunaan hutan mengalami penafsiran ulang.

Tutupan hutan dalam statistik melampaui 70-80 persen dari hampir semua negara bagian di wilayah ini. Ini adalah satu dari sedikit sisa wilayah di Bumi yang beragam secara ekologis dan belum disentuh. Di dalam hutan-hutannya terdapat komunitas-komunitas yang berkembang baik. Mereka 'memiliki' dan 'mengontrol' wilayah-wilayah hutan ini di bawah kendali komunitas. Negara-negara bagian tidak punya wewenang langsung di hutan-hutan komunitas ini, kecuali untuk kawasan cadangan dan kawasan lindung negara. Sebagai contoh, 77 persen dari seluruh wilayah negara bagian Manipur adalah hutan, tetapi hanya 7 persen darinya berada di bawah kontrol pemerintah; untuk tanah hutan sisanya, kendali langsung berada di tangan komunitas. Meskipun begitu, di Assam, lajur-lajur besar dari hutan asli dirusak ketika agen-agen kolonial Inggris membawa masuk perkebunan teh. Hari ini perkebunan-perkebunan teh menduduki 312.210 hektar di Assam, dan dipercaya merupakan wilayah tanaman teh tunggal yang terluas di dunia.

Perkebunan-perkebunan tanaman komersial, terutama karet, meskipun tidak baru bagi wilayah ini, makin menggerogoti wilayah hutan asli. Perkebunan-perkebunan teh dan kopi meluas ke hutan pegunungan. Di Tripura, perusakan hutan telah dimulai untuk menyiapkan tanah sampai seluas 100.000 hektar perkebunan karet tambahan. Tripura telah menjadi penghasil karet alam kedua terbesar di India. Perluasan ini berlangsung di tanah hutan suku di bawah penguasa setempat. Perkebunan karet juga diperluas sampai ke negara-negara bagian Arunachal dan Nagaland.

Perluasan perkebunan industrial lainnya adalah kelapa sawit di Mizoram. Pemerintah Mizoram sedang mengejar sasaran untuk meningkatkan kawasan perkebunan kelapa sawit sampai sekitar 150.000 hektar.

Di Meghalaya, dampak-dampak lingkungan, dan terutama, perusakan hutan oleh pertambangan batubara dan batu kapur telah terdokumentasikan dengan baik dan perluasan pertambangan batubara telah dilarang oleh Mahkamah Agung. (1) Kemajuan perkebunan komersial dan pertambangan skala-besar di tanah-tanah yang dikuasai komunitas juga memicu perubahan sifat dari maupun tekanan pada masyarakat/desa-desa.

Undang-Undang dan Institusi-Institusi yang mengurus hutan di wilayah ini beragam. Hukum-hukum dan institusi-institusi adat berbeda dari suku satu ke yang lain, tetapi kesemuanya berorientasi pada komunitas. Umumnya, kepala-kepala desa atau dewan desa dan/atau klan/marga membagikan tanah hutan kepada keluarga untuk perladangan berpindah (*jhum*). Apabila sebuah petak ladang ditinggalkan, tanah tersebut kembali pada komunitas. Menjual tanah tidak dibolehkan begitu pula tanah komunitas secara tradisional tidak diwariskan atau diserahkan ke pemilikan pribadi. Meskipun demikian, baik menjual tanah dan transfer tanah ke pemilikan pribadi mulai muncul sebagai akibat dari tekanan dari dalam maupun luar. Dewasa ini, pemimpin-pemimpin suku setempat

diketahui telah menyerahkan tanah/hutan lewat apa yang dikenal sebagai "sertifikat tidak keberatan" kepada usaha-usaha komersial yang memberikan dokumentasi telah melewati aturan pengaman lingkungan dan lainnya. Dalam kasus-kasus lainnya, dewan desa telah menahan ijin untuk menambang -kenyataan yang melegakan bahwa kesepakatan dan penentuan-nasib-sendiri untuk masa depan kadang-kadang berjalan.

Undang-Undang tentang Suku-Suku Asli Terpinggirkan dan Penghuni Hutan Tradisional Lainnya (Pengakuan Hak-Hak atas Hutan), 2006 adalah sebuah kebijakan nasional progresif yang bertujuan mengoreksi ketidak-adilan menyebar yang dilakukan terhadap suku-suku serta penghuni hutan tradisional. Dia disebut juga sebagai Undang-Undang Hak-Hak Hutan, Undang-Undang Hak-Hak Suku, Undang-Undang Skuku, dan Undang-Undang Tanah Suku (lihat [WRM Bulletin 205](#)). Undang-undang ini, untuk pertama kalinya, telah, antara lain, mengakui dan memberikan hak-hak hutan serta penghuni di permukiman hutan bagi Suku-Suku Asli Terpinggirkan dan penghuni tradisional yang telah berdiam di hutan seperti itu turun temurun tetapi hak-haknya tidak terekam. Kecuali bagi Assam dan Tripura, enam negara bagian lainnya di Timur Laut belum menerapkannya dengan alasan bahwa telah ada pemilikan komunitas atas hutan dan bahwa ada ketakutan bahwa perundang-undangan darilaur kelak akan mengesampingkan kuasa/wewenang lokal.

Faktor-faktor yang bisa sangat mempengaruhi hutan di wilayah ini di tahun-tahun mendatang mencakup perluasan pertambangan, bendungan-bendungan, perluasan jalan raya dan rel kereta, infrastruktur, perluasan perkebunan komersial, kegiatan-kegiatan yang menyangkut perubahan iklim.

Pertambangan batubara adalah sebuah soal genting di negara-negara bagian Assam dan Meghalaya. Karena dampak lingkungannya yang parah, Tribunal Hijau Nasional dari Mahkamah Agung telah melarang pertambangan batubara untuk saat ini. (1) Sebuah kejadian penumpahan minyak di lokasi operasi dari Perusahaan Minyak dan Gas Alam (*Oil and Natural Gas Corporation/ONGC*) di Distrik Wokha negara bagian Nagaland telah menciptakan kerusakan besar-besaran pada hutan dan tanah-tanah pertanian. (2) Organisasi-organisasi lokal telah menuntut ke pengadilan untuk kompensasi dan rehabilitasi. Ada proposal-proposal yang diajukan untuk pertambangan minyak di negara-negara bagian Mizoram, Manipur dan Arunachal. Semua proposal ini akan mengakibatkan wilayah hutan rusak dan dialihkan ke pemanfaatan lain.

Sebagai tambahan, pemerintah merencanakan untuk membangun lebih dari 150 bendungan, sebagian besar darinya akan berskala-besar. Di negara bagian Arunachal saja, Pemerintah telah mengesahkan beberapa Memorandum Kesepakatan untuk 127 bendungan di berbagai bagian dari 42 sungai dengan sebanyak 59 perusahaan pembangun bendungan, dengan tujuan membangkitkan daya listrik sebesar 42.591 MW. Semua bendungan ini akan menenggelamkan lajur-lajur luas dari wilayah hutan yang

rapat dan belum tersentuh. Di Manipur, Bendungan Besar Tipaimukh 'dibatalkan'; pembangunannya akan bisa menenggelamkan 22.777 hektar tanah hutan. Oposisi lokal bergabung dengan protes nasional dan internasional melancarkan kasus langka di mana sebuah dam dihentikan karena akan menenggelamkan wilayah luas dari hutan dan penghidupan yang tak ternilai yang bertautan dengan hutan tersebut.

Jalan raya, rel kereta dan infrastruktur merupakan prioritas dalam rencana pemerintah India untuk 'membuka' wilayah ini. 'Membuka' kebudayaan dan 'kecantikan' wilayah tersebut untuk pariwisata, 'membuka' hutan untuk ekstraksi kayu, kemudahan simpanan karbon, pengobatan tradisional dsb., 'membuka' untuk merampok mineral dan infrastruktur untuk menghubungkan India ke wilayah ASEAN yang secara geopolitis dan ekonomis berpengaruh. Dua buah infrastruktur kunci, Jalan Raya Trans-Asia dan Rel Kereta Trans-Asia pada saat ini tengah dibangun. Sebuah jejaring pipa minyak dan gas yang menautkan Asia Selatan dengan Asia Tenggara tengah direncanakan dan sebuah Grid Energi juga telah dibangun. Semua pembangunan infrastruktur ini akan mempunyai akibat langsung pada jalan hidup dan penghidupan masyarakat hutan serta merusak wilayah-wilayah luas dari hutan.

Perubahan Iklim dan Hutan

Sementara komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan seperti yang didapati di seluruh Timur Laut menempuh beberapa jalan hidup yang paling rendah-karbon, perubahan iklim telah mempengaruhi cara hidup dan penghidupan mereka. Dampak-dampak tersebut diperburuk oleh penerapan dari dua jenis kegiatan yang berkaitan dengan hutan yang mustinya membantu memitigasi pemanasan global. Satu di antaranya adalah memulihkan kembali tanah "rusak" atau 'melindungi' hutan yang ada sebagai simpanan karbon atau cebakan karbon; jenis kegiatan kedua adalah perkebunan biomasa industrial untuk bahan-bakar nabati atau pembangkitan energi. Perkebunan diciptakan untuk maksud tersebut - biasanya wilayah sangat luas dari perkebunan monokultur, dimiliki dan dikuasai oleh korporasi-korporasi - sulit dilihat sebagai sebuah hutan oleh imajinasi yang paling jauh sekalipun.

Salah satu arsitek proyek-proyek karbon hutan di Timur Laut adalah Bank Dunia. Sebagai bagian dari kajiannya 'Rerantai Sumber-sumber Alam, Air dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan dan Pertumbuhan di India Timur Laut', (3) kajian latar-belakang 'Keuangan Karbon dan Sektor Perhutanan di India Timur Laut' jelas mendukung dan meratakan jalan untuk mengonversi tanah pertanian dan hutan bagi proyek-proyek karbon hutan yang lebih 'mendatangkan laba'. Sebuah latar-belakang tambahan untuk kajian yang sama dinamai 'Kajian Sektor Perhutanan India Timur Laut' juga menjurus pada program-program penangkapan karbon di wilayah tersebut. Dengan niat Bank Dunia yang jelas untuk turut campur dalam sektor perhutanan di Timur Laut, ada kemungkinan bahwa Proyek Sumber-Sumber Penghidupan Timur Laut akan memiliki proyek-proyek menyangkut karbon yang cukup besar. Jika rencana Bank

Dunia untuk melibatkan seluruh Timur Laut dalam proyek ini, dan jika cebakan-cebakan karbon merupakan bagian dari proyek di setiap komponen distrik, seluruh bentang alam dan komunitas di Timur Laut akan terpengaruh secara negatif oleh jawaban palsu terhadap krisis iklim.

Community Forestry International (CFI) yang berbasis di AS memulai Proyek REDD+ Mawphlang sebagai proyek perintis pertama di wilayah tersebut pada tahun 2011. (4) Proyek REDD+ Mawphlang terletak di Perbukitan Khasi Timur di distrik Meghalaya, dan kadang-kadang disebut sebagai 'Proyek REDD+ Komunitas Perbukitan Khasi' oleh CFI. Wilayah proyek mencakup 15.217 hektar terdiri dari sekitar 9.270 hektar hutan lebat dan 5.947 hektar hutan terbuka di 2010. Hutan yang dimasukkan dalam proyek REDD+ merupakan sebuah kebun hutan kuno yang disucikan. CFI mendaftarkan sejumlah ORNOP dan kelompok-kelompok lokal sebagai kolaborator: *Bethany society*, Dewan Distrik Otonom Perbukitan Khasi, *Planet Action* dan Yayasan Waterloo milik swasta yang berbasis di Inggris. Organisasi lokal Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam, Masyarakat Kesejahteraan Mawphlang terdaftar sebagai proponent proyek bersama CFI Yayasan Waterloo menyediakan GBP100.000 dalam dukungan pembiayaan bagi proyek untuk 2011-12. Menurut dokumen proyek, hak-hak karbon untuk hutan yang tercakup dalam proyek REDD+ tersebut dikaitkan dengan Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam, Federasi Masyarakat Kesejahteraan Mawphlang. Proyek REDD Komunitas Perbukitan Khasi disertifikasi di bawah ketentuan-ketentuan baku Plan Vivo (Edinburgh, Inggris) pada bulan Maret 2013. Di bulan Juni 2013, 21.805 sertifikat kompensasi karbon diterbitkan di Pencatatan Markit, sebuah basis data swasta yang melacak penerbitan kredit REDD+. Dokumen-dokumen proyek menyarankan bahwa proyek tersebut tengah memasuki tahap implementasi kedua di 2017.

Sementara dokumen-dokumen *online* memuat semua informasi yang dikutip di atas, warga di lapangan yang merupakan 'pemilik' sesungguhnya dari hutan tidak tahu REDD+ itu apa. Banyak warga desa terbiasa bercocok tanam di perbukitan. Akan tetapi, ketika proyek REDD+ dimulai, mereka harus mencari tempat-tempat lain untuk menanam. Sedikit sekali manfaat bagi warga desa dari proyek REDD+ ini. Sebuah proyek REDD+ baru lainnya yang mencakup sebuah wilayah seluas 44.391 hektar terletak di distrik-distrik Aizawl dan Mamit di Mizoram. Program baru ini dijalankan bersama oleh Dewan Riset dan Pendidikan Perhutanan India (*Indian Council of Forestry Research & Education/ICFRE*), Pusat Internasional untuk Pembangunan Pegunungan Terpadu (*International Centre for Integrated Mountain Development/ICIMOD*) Nepal, dan Badan Kerjasama Internasional Nepal, Jerman (GIZ). (5) Seperti halnya dengan proyek REDD+ Mawphlang, warga desa dan pejabat dewan desa telah menerima sedikit sekali bahkan sama-sekali tidak tentang proyek REDD+, bagaimana ia berfungsi serta akibat-akibatnya. Dalam dokumen mereka, proyek-proyek REDD+ digambarkan sebagai jalan keluar dari perladangan *Jhum* dan bahwa kegiatan-kegiatan kompensasi karbon hutan yang baru ini dapat menjawab

kebutuhan-kebutuhan keuangan dari desa-desa. Di dua desa yang penulis kunjungi, hutan yang ada telah dijaga bertahun-tahun di bawah inisiatif desa sebelum kedatangan proyek REDD+. Proyek karbon telah menguangkan dan 'mengambil alih hutan' dari warga desa yang telah memberikan kerja keras dan komitmen suka-rela untuk melindungi hutan jauh sebelum kedatangan proyek REDD+. Ini merupakan jaman baru di mana komunitas melepaskan kuasa atas hutan mereka kepada organisasi-organisasi dari luar.

What is most perplexing is how those villagers and communities least responsible for climate change are being requested to take up the key task of reducing their meagre carbon emissions. There are news that agrofuel expansion will be re-launched with new vigor. If these plans were to materialize, it would spell bad news for the forest and for local subsistence food production.

Jenis kegiatan kedua yang dipromosikan atas nama perlindungan iklim dan yang telah mempengaruhi hutan dan sumber penghidupan rakyat di Timur Laut adalah perkebunan bahan-bakar nabati, umumnya jathropa. Komisi Perencanaan Pemerintah India membentuk panitia-panitia untuk mempromosikan perkebunan bahan-bakar nabati; mereka menam modal di pembangunan produk, kajian-kajian rekayasa, menyederhanakan regulasi-regulasi hukum, spesifikasi perkebunan, pemasaran, dsb. Di Timur Laut, perusahaan patungan D1-Williamson Magor merupakan promotor utama dari perkebunan Jatropha. D1 Oils Trading Ltd., Inggris merupakan salah satu perusahaan pertama yang memperoleh tanah untuk produksi bahan-bakar nabati dan Williamson Magor adalah grup perkebunan teh India terbesar. Mereka mempunyai rencana-rencana besar perluasan, bukan hanya untuk perkebunan jatropha di Timur Laut tetapi melintas negara-negara Asia dan Afrika. Mereka mengumumkan rencana untuk 100.000 hektar perkebunan jatropha di Timur Laut saja, dan para petani dan *Jhumias* (warga desa yang mempraktikkan perladangan berpindah) dibujuk dengan pinjaman bank dan jaminan untuk bisa membeli kembali tanahnya. Seperti halnya di tempat lain, percobaan perkebunan jatropha rupanya telah gagal, bagaimanapun, dan biaya-biayanya ditanggung olehwarga desa yang ditinggalkan dengan berbagai pengeluaran tetapi tanpa minyak jatropha untuk dijual serta ladang-ladang yang tertutupi oleh tanaman beracun itu. Kunjungan-kunjungan lapangan menunjukkan ladang yang ditinggalkan serta tanah-tanah *jhum* yang tertutupi dengan tanaman jatropha. Apa yang paling membingungkan adalah bagaimana warga desa dan komunitas-komunitas yang paling sedikit beban tanggung-jawabnya atas perubahan iklim diminta untuk mengerjakan tugas kunci mengurangi emisi karbon mereka yang tak seberapa. Ada kabar bahwa perluasan bahan-bakar nabati akan kembali dilancarkan dengan semangat baru. Jika rencana-rencana ini jadi diterapkan, itu akan berarti kabar buruk buat hutan dan buat produksi pangan subsisten lokal.

Ram Wangkheirakpam [wangkheilakpa\(at\)gmail.com](mailto:wangkheilakpa@gmail.com)

Direktur Eksekutif, *Indigenous Perspectives*, Imphal, Manipur

(1) Sebuah artikel tentang keputusan Mahkamah Agung melarang pertambangan batubara di Timur Laut bisa didapatkan di <http://www.downtoearth.org.in/news/meghalaya-suspends-rathole-coal-mining-44432>

(2) <http://kanglaonline.com/2011/09/pil-seeking-rs-1000-crore-compensation-filed-for-oil-spill-in-nagaland/>

(3) World Bank study 'Natural Resources, Water and the Environment Nexus for Development and Growth in North East India'; background study 'Carbon Finance and Forest Sector in North East India'; and 'Forest Sector Review of North East India'

(4) REDD+ di India, dan proyek REDD+ pertama India: sebuah kajian kritis. Laporan oleh Soumitra Ghosh. Tersedia di http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2011/11/03_Mausam_Sept-2011.pdf ; ikhtisar dan komentar oleh REDD-Monitor tersedia di <http://www.redd-monitor.org/2011/11/29/indias-first-redd-project-in-the-east-khasi-hills-when-you-say-that-i-need-permission-to-cut-my-own-tree-i-have-lost-my-right-to-my-land/>

(5) Mizoram terpilih di antara yang lain untuk REDD+ project <http://www.mizoramtourism.org/mizoram-news/mizoram-selected-among-others-for-redd-project> dan inisiatif ICFRE tentang REDD+ , 10 slides terakhir mengacu pada proyek REDD+ di Mizoram; bisa didapatkan di: http://www.ignfa.gov.in/photogallery/documents/REDD-plus%20Cell/Modules%20for%20forest%20&%20Climate%20Change2016/Presentations/Resource%20Persons/TPSingh_IGNFA18Oct2016.pdf



Indonesia: Rancangan undang-undang mengancam untuk menghidupkan kembali kuasa korporasi atas keragaman pertanian

Di tahun 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Pasal-Pasal kunci dari Undang-Undang 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal-pasal tersebut melarang petani meneruskan praktik menyejarah untuk seleksi dan pembibitan tanaman - praktik yang sama yang telah menciptakan keragaman pertanian yang ada sekarang. (1) Sekarang, Rencana Undang-Undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati serta tentang Kelapa Sawit tengah mengancam untuk menghidupkan kembali corak kontrol korporasi atas keragaman tanaman pertanian yang para hakim Mahkamah Konstitusi telah pertimbangkan sebagai melanggar konstitusi dalam keputusan mereka di 2012. Secara bersamaan, kedua usulan undang-undang bergerak lebih jauh lagi: Keduanya akan membatasi pencapaian komunitas pada penggunaan dan pembudidayaan tanaman yang dilindungi oleh hukum atau yang untuk tanaman tersebut perusahaan telah mendaftarkan hak patennya.

Di antara 1980 dan 2000, Pemerintah Indonesia mendorong 'modernisasi' pertanian yang dilambangkan dengan penggunaan pupuk kimia, bibit hibrida, pestisida, traktor dan alat-berat lainnya. Sebagai bagian dari 'modernisasi' ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang tersebut diloloskan tanpa konsultasi lebih dulu dengan perhimpunan-perhimpunan petani atau komunitas-komunitas petani meskipun dia sungguh mempengaruhi jalan hidup mereka. Undang-Undang tersebut melarang petani untuk menanam tanaman-tanaman yang digunakan sebagai tanaman pertanian atau tanaman obat dimana korporasi telah mendaftarkan patennya. Tetapi seleksi bibit dan pembudidayaan tanaman oleh petani telah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem-sistem pertanian petani dan juga tumpuan peradaban.

Sampai dengan akhir 2011, banyak petani yang meneruskan praktik budidaya tanaman pangan dinyatakan bersalah setelah dituntut oleh korporasi yang mengaku memiliki hak-hak paten dari tanaman-tanaman ini. (2) Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 99 tahun 2012 membatalkan Pasal-pasal dari Undang-Undang 1992 yang mengizinkan monopoli tanaman dan bibit yang digunakan dalam pertanian kepada korporasi. Petani

dibolehkan kembali tanpa risiko tuntutan hukum untuk memilih dan membudidayakan tanaman yang mereka gunakan seperti yang mereka telah biasa lakukan.

Di 2016, dua rancangan undang-undang diperkenalkan di Indonesia, satu tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan yang kedua tentang Kelapa Sawit. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati mengenalkan kembali monopoli korporasi dalam pembudidayaan tanaman serupa dengan hak-hak korporasi yang telah dikukuhkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 12 tahun 1992 - Pasal-Pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2012. Lebih lagi, Undang-Undang Konservasi dan Keragaman Hayati yang diusulkan akan melarang komunitas untuk menggunakan atau membudidayakan varietas-varietas spesies yang terdaftar pada Lampiran Konservasi atau jika, misalnya, sebuah perusahaan farmasi atau kelapa sawit telah mendaftarkan paten. Di bawah *adat* (hukum adat), komunitas diperkenankan menggunakan spesies-spesies tanaman yang dilindungi yang digunakan secara tradisional, misalnya sebagai obat-obatan tradisional, jika mereka telah mendaftarkan spesies-spesies tersebut sebagai "sumberdaya" genetika bagi penggunaan tradisional dengan pihak yang berwenang.

Pembatasan dalam undang-undang yang diusulkan seperti dua sisi mata uang - sisi manapun yang terpilih, undang-undang akan merugikan *adat* komunitas. Jika komunitas menggunakan tanaman tanpa seijin pemerintah, mereka akan menghadapi konsekuensi kriminal; jika komunitas memohon ijin, ada risiko besar bahwa hak-hak intelektual tradisional mereka menyangkut kemampuan menyembuhkan dari tanaman-tanaman tersebut akan dicuri oleh korporasi farmasi sebelum pengetahuan komunitas diterima sebagai memenuhi persyaratan legal dari usulan undang-undang tersebut. Korporasi memburu informasi tentang penggunaan medis tradisional dari tanaman-tanaman, yang komunitas harus cantumkan dalam lamaran mereka untuk mendapatkan ijin penggunaan. Komunitas ada kemungkinan di awalnya diberi ijin tetapi perusahaan kemudian akan mendaftarkan sebuah paten dan penggunaan tradisional serta pembudidayaan tanaman kemudian akan dilarang di bawah undang-undang sebab sebuah entitas (korporasi) lain telah mendaftarkan paten untuk tanaman ini. Yang manapun, usulan undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati menyodorkan sebuah ancaman besar bagi penggunaan dan pembudidayaan tanaman yang komunitas secara tradisional gunakan, baik untuk pangan maupun obat-obatan.

Dalam sejarah telah tercatat bagaimana pengetahuan rakyat Indonesia tentang obat-obatan belukar tradisional telah dirampas oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Informasi tersebut kemudian dikomersialkan dan dipatenkan oleh sang industri tanpa kesepakatan dari pengguna tradisional dan pemilik pengetahuan. Obat-obatan belukar tradisional untuk berbagai penyakit juga telah digunakan dalam riset akademik yang mendalam. Riset-riset macam ini dan komersialisasinya, pun, setara dengan pencurian hak milik intelektual karena seleksi belukar tertentu untuk obat khusus untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, komposisinya, dan praktik yang digunakan untuk menyiapkan dan menggunakan obat-obatan tradisional tersebut merupakan hasil dari riset terus-menerus yang dilakukan oleh warga komunitas dan diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini, sayangnya, tidak dihargai dan diakui sebagai riset mendalam karena ia tidak mengikuti pendekatan akademik kontemporer.

Maksud dari usulan undang-undang tentang Kelapa Sawit adalah untuk mendefinisikan kelapa sawit sebagai spesies yang terdapat secara alami di Indonesia. Ini, bagaimanapun, akan mengaburkan fakta bahwa kelapa sawit - sebuah spesies asli Afrika Barat dan Tengah, di mana varietas kelapa sawit tradisional ditanam dan digunakan untuk beraneka ragam produk dan penggunaan - telah diperkenalkan ke Indonesia oleh industri kelapa sawit. (3) Sekali dianggap spesies yang ada secara alami di Indonesia, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mematenkan tanaman tersebut, dan bersama dengan Pasal 15 dari usulan undang-undangan Konserasi dan Keragaman Hayati, memberi keleluasaan bagi mereka untuk membatasi penggunaan kelapa sawit oleh komunitas pada penggunaan buahnya - bagian yang perusahaan tertarik membelinya. Tetapi penggunaan komunitas atas bagian lain manapun dari tanaman bisa dilarang - jika kelapa sawit dinyatakan sebagai sebuah spesies yang terdapat secara alami di Indonesia di mana usulan undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati juga akan berlaku. Menyatakan kelapa sawit sebagai spesies yang terdapat secara alami di Indonesia dengan demikian juga setara dengan perampasan tanah kedua bagi petani yang menanam kelapa sawit di tanah mereka serta bagi komunitas-komunitas yang tinggal di sekeliling perkebunan korporasi sebab perusahaan kelapa sawit bisa membatasi penggunaan kelapa sawit oleh komunitas hanya pada buahnya saja - bagian dari tanaman yang perusahaan minati. Sekali undang-undang ini disahkan, akan makin sulit bagi petani untuk merebut kembali tanahnya.

Apabila kedua undang-undang yang diusulkan dipertimbangkan serentak, menjadi jelaslah bahwa niat dari pemerintah bukanlah untuk memecahkan sesuatu masalah genting yang mempengaruhi komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Melainkan, undang-undang usulan tersebut berguna untuk meningkatkan kontrol korporasi atas keragaman hayati pertanian dan tanah yang menarik bagi korporasi. Perubahan-perubahan hukum ini harus dilihat sebagai bagian dari sebuah strategi korporasi - terencana dan terorganisir dengan baik - untuk meluaskan kontrol korporasi, bukan hanya kontrol atas tanah komunitas tetapi juga pemanfaatan 'keragaman hayati' oleh komunitas. Mengajukan peraturan-peraturan seperti kedua usulan undang-undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan tentang Kelapa Sawit di Indonesia, harus dilihat sebagai bagian dari pengesahan penyitaan sumber-sumber kehidupan rakyat. Mengesahkan undang-undang ini juga akan memberikan perlindungan hukum, jika bukan kekebalan pada kejahatan korporasi yang mencuri pengetahuan tradisional tentang penggunaan tanaman yang komunitas telah sempurnakan dan turunkan dari generasi ke generasi: Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memutuskan bahwa monopoli korporasi semacam itu atas pembudidayaan dan penggunaan tanaman adalah melanggar konstitusi. Toh, pemerintah tengah mengemukakan agenda korporasi dengan mengusulkan undang-undang yang bertujuan menghidupkan kembali monopoli korporasi atas keragaman hayati pertanian, keragaman bibit dan genetik dari varietas-varietas tanaman yang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia telah nyatakan melanggar konstitusi.

Kearifan komunitas atau tradisional yang tertampilkan dalam *adat* serta keragaman sangat tinggi dari varietas-varietas tanaman yang digunakan oleh komunitas tradisional serta petani sekarang merupakan petunjuk tentang proses adaptasi panjang di antara alam, keragaman tanaman dan komunitas. Keragaman pertanian dan juga komunitas-komunitas yang menghasilkannya bergantung pada pemanfaatan dan akses secara bebas

ke tanah yang menjadi rumah bagi tanaman-tanaman yang digunakan komunitas. Penggunaan serta akses komunitas ke tanah dan tanaman inilah yang undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati serta Kelapa Sawit pertaruhkan.

Kejahatan korporasi tak dapat dipahami hanya sebagai tindak kejahatan menyita, mencuri atau membawa kabur aset-aset negara. Lebih daripada itu, kendali korporasi melalui perlindungan dan undang-undang hak-hak kekayaan intelektual yang melengkapi korporasi-korporasi dengan monopoli atas tanaman dan bibit telah menyita tanah milik komunitas serta pengetahuan mereka atas pemanfaatan tradisional dari tanah-tanah ini. Kejahatan semacam itu memaksakan proses-proses perubahan mendasar pada komunitas: dari status pemilik menjadi status konsumen, konsumen tanaman dan bibit yang telah diubah menjadi komoditas yang dilindungi oleh paten-paten korporasi. Undang-undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan tentang Kelapa Sawit yang diusulkan merupakan bagian dari proses mengesahkan pencurian korporasi atas pengetahuan dan pemanfaatan tradisional komunitas atas 'keragaman hayati'.

Zenzi Suhadi

WALHI, Kepala Departemen Riset, Advokasi dan Hukum Lingkungan

(1) Keputusan No. 99/PP-X/2012 dari Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal-Pasal 5, 6, 9, 12, dan 60 dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

(2) Lihat juga: Petani Indonesia dihukum karena membudidayakan bibit mereka sendiri.
http://www.alt.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42

(3) Untuk sebuah gambarann tentang keragaman pemanfaatan varietas-varietas kelapa sawit tradisional di Afrika Barat dan Tengah, lihat misalnya 'Afrika: sisi lain dari kelapa sawit. Sebuah sejarah panjang dan keragaman hayati yang kaya' oleh GRAIN <https://www.grain.org/article/entries/5035-a-long-history-and-vast-biodiversity> dan film 'Perempuan Afrika Barat mempertahankan kelapa sawit tradisional' <http://www.farmlandgrab.org/post/view/26141-video-west-african-women-defend-traditional-palm-oil>



Melawan Kutukan Koneksi di Kamboja

Kelompok Pheapimex dikenal baik di Kamboja dan di luar negeri untuk kontrak-kontrak investasi skala besar yang memberinya akses tak terbatas pada hutan, tanah dan air, dan untuk para pemiliknya, yang telah dijuluki sebagai "pasangan yang berkuasa" krena pengaruh politik dan finansialnya. (1) Artikel berikut ini, pertama diterbitkan dalam Buletin WRM di 2013, menggambarkan Koneksi Tanah Ekonomik Pheapimex (ELC) yang tersebar di seantero propinsi-propinsi Pursat dan Kampong Chhnang. Koneksi tersebut mendapatkan reputasi buruknya untuk ukurannya yang besar-besaran, perusakan ekologis serta konflik-konflik dengan komunitas-komunitas lokal menyangkut tanah-tanah ladang, penggembalaan dan hutan, serta sumber-sumber air.

Di 2016, setelah 16 tahun perjuangan, komunitas-komunitas yang terkena dampak di propinsi Kampong Chhnang memenangkan pertempuran mereka melawan Pheapimex. Perusahaan sepakat mengembalikan 170.000 hektar (dari sekitar 176.000 hektar di ELC) kembali ke penggugat yang berhak. Menurut warga setempat, perusahaan telah berada dalam krisis karena kemerosotan dalam harga singkong, pemberontakan oleh pekerja perkebunan, serta meningkatnya ketegangan di antara pekerja perusahaan dan komunitas-komunitas terdampak. Para pekerja perkebunan tak dibayar secara teratur dan mulai mensabot operasi-operasi perusahaan dengan mencuri bagian-bagian permesinan. Untuk sebagian besarnya, gubernur propinsi sendiri mendukung akuan tanah dan hutan dari komunitas-komunitas terdampak.

Pheapimex belum keluar dari Pursat, meskipun di situ juga, operasi-operasinya tampak sudah sangat berkurang. Berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang hanya ada lima situs-kerja dengan sekitar 20-30 pekerja, tanpa satupun pekerja yang merawat singkong yang telah ditanam. Di 2016, pekerja mulai menuntut kembali upah dari perusahaan dan laporan-laporan terbaru menunjukkan bahwa sabotase melawan operasi perusahaan tampaknya juga telah muncul di situ. ELC di Pursat mencakup 130.000 hektar, 30.000 hektar darinya telah dibersihkan. Belum diketahui apakah perusahaan akan mempertahankan semua tanah di wilayah koneksi untuk seluruh masa koneksi, atau mengembalikan tanah-tanah yang disengketakan kepada komunitas-komunitas yang kena dampak seperti yang perusahaan sepakati untuk lakukan di propinsi Kampong Chhnang.

Situasi menyangkut konsesi Pheapimex di Kampong Chhnang merupakan sebuah kemenangan menentukan untuk komunitas-komunitas setempat dan bisa juga terjadi di Pursat. Meskipun demikian, perusahaan dan para pemiliknya masih jauh dari terkalahkan di Kamboja. Pheapimex memiliki operasi-operasi patungan di propinsi Mondulkiri dengan Wuzhishan LS, sebuah perusahaan perkebunan China, dan Grup Pengembangan Investasi Internasional Kamboja (*Cambodia International Investment Development Group/CIIDG*), sebuah perusahaan pertambangan China. (2) Para pemilik Pheapimex juga memiliki Shukaku Inc., perusahaan yang mengembangkan *real estate* di danau Beung Kak, dan memiliki keterlibatan penting di sebuah konsesi tambang yang diberikan pada Alex Corporation di Mondulkiri. (3) Mereka juga terhubung dengan Sinohydro (Cambodia) United Ltd., perusahaan yang mengambil alih kontrak untuk proyek listrik tenaga air di Lembah Areng di pegunungan Cardamom yang sekarang dibatalkan. Konsesi pertambangan CIIDG mencakup tanah-tanah tradisional dari kelompok masyarakat asi *Phnong*, yang telah menyuarakan keprihatinan mengenai dampak-dampaknya pada situs-situs hutan-hutan keramat dan pemakaman. Orang *Phnong* - yang meliputi sekitar setengah dari penduduk propinsi - telah menghadapi pelanggaran-pelanggaran semacam itu di wilayah-wilayah konsesi Wuzhishan LS, ketika tanah-tanah tradisional mereka diobrak-abrik oleh operasi perusahaan. Didukung oleh jejaring aktivis hak-hak komunitas yang terus tumbuh, mereka tengah mempersiapkan diri untuk menghentikan operasi perusahaan sebelum wilayah-wilayah nenek-moyang mereka diganggu atau dirambah.

Di 2017, kutukan konsesi berlanjut di Kamboja. Tetapi begitu pula dengan perjuangan rakyat. Seperti rebung dengan bambunya, seorang penduduk dari Krang Skea di propinsi Kampong Chhnang menyebutkan di artikel buletin WRM 2013 yang dimuat kembali di bawah ini, tentang perjuangan komunitas melawan konsesi Pheapimex, ketika perjuangan mereka mengakhiri kutukan ini, menguasai kembali tanah, hutan dan iar, serta memulihkan sistem-sistem ekologis yang rusak tengah menguat.

Kutukan Konsesi di Kamboja

Artikel diterbitkan pertama kali di Buletin WRM 193, September 2013

"Perusahaan berjanji meningkatkan tutupan hutan tetapi mereka menanam singkong; singkong bukanlah pohon; sebuah perkebunan singkong bukanlah sebuah hutan." Penduduk dari Ansar Chambor, Pursat, Kamboja.

Sejak 2000, penduduk di lebih dari 111 desa telah berjuang melawan sebuah konsesi tanah raksasa yang mencakup 315.028 hektar melintasi propinsi-propinsi Pursat dan Kampong Chhnang di Kamboja. Kesepakatan konsesi membolehkan Pheapimex - sebuah perusahaan Kamboja yang kuat -- untuk merampas ladang, hutan dan tanah-tanah bersama untuk menanam akasia dan singkong dalam perkebunan monokultur. Milik Choeung Sopheap dan suaminya Lao Meng Khin, seorang senator dari Partai Rakyat Kamboja (*Cambodian Peoples Party/CPP*) yang berkuasa, Grup Pheapimex dipandang oleh banyak orang Kamboja sebagai tak tersentuh hukum karena hubungan dekat di antara para pemiliknya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan sumbangan-sumbangan dalam jumlah besar yang Pheapimex berikan pada CPP.

Meskipun perundang-undangan yang ada membatasi luasan setiap konsesi tanah sampai 10.000 hektar, Pheapimex mengamankan kesepakatannya di 1997, sebelum undang-undang yang mengatur konsesi tanah ekonomik (ELC) berlaku. Rencana-rencana awalnya adalah mendirikan sebuah perkebunan eucalyptus dan pengolahan bubur-kayu dan kertas, untuk itu Pheapimex bermitra dengan Grup Koperasi Pertanian China (*Chinese farm Cooperation Group*) dan mengatur pembiayaan dari Bank Ekspor-Import China. Pheapimex adalah juga mitra Kamboja dari perusahaan perkebunan China Wuzhishan. Semenjak diberlakukannya undang-undang ELC, Pheapimex berkolaborasi dengan para perantara serta perusahaan-perusahaan lain yang memperoleh tanah dalam batas-batas yang diperbolehkan tetapi merupakan bagian dari operasi besar-besaran Pheapimex.

Sampai dengan 2002, perusahaan mulai membuka hutan dan tanah pertanian, membangun jalan dan kanal, serta menyiapkan persemaian di komune Ansar Chambor, distrik Krakor di Pursat. Dalam protes, warga desa menutup jalan dan mengadukan keluhan pada kabinet kerajaan di Phnom Penh, ibukota negara. Meskipun pemerintah pusat tidak menanggapi dengan positif, protes-protes lokal menghentikan operasi-operasi di Ansar Chambor untuk sesaat. Bagaimanapun, perusahaan terus mengaku, memagari dan membuka lahan di wilayah-wilayah lainnya. Sampai dengan 2008, persemaian di Ansar Chambor telah sepenuhnya operasional dan Pheapimex telah mulai menggusur warga dari tanahnya di wilayah-wilayah lain dalam konsesinya, menutup jalan masuk warga ke hutan, menanam singkong dan akasia, serta membangun penampungan-penampungan pekerja.

Sejak itu, operasi-operasi perusahaan telah meluas dan makin cepat, sedangkan peralatan berat seperti bulldoser dan pengeruk tanah lalu lalang di seluruh wilayah konsesi. Perluasan dilakukan dalam tahapan-tahapan, akan tetapi komunitas-komunitas yang kena dampak tidak mendapatkan informasi lebih dulu tentang rencana-rencana perusahaan dan seringkali dikejutkan. Perusahaan menggunakan berbagai cara untuk mengamankan "kerjasama" lokal, dari menyogok dan menipu sampai intimidasi, kekerasan dan pengurangan. Di 2010, Pheapimex mengorganisir sebuah upacara "penyerahan hadiah" di Ansar Chambor di mana warga diberi beras, mi instan dan *krumah* (syal tradisional) sebagai bukti dari niat baik perusahaan. Para pejabat pemerintah kemudian memuji usaha-usaha Phepimex untuk membawa kemakmuran ke wilayah tersebut dan memerintahkan komunitas untuk mau bekerja-sama sekarang setelah mereka sekarang menjadi penerima budi-baik perusahaan.

Para pejabat distrik dan komune telah memberitahu komunitas yang terkena dampak bahwa Pheapimex tidak bisa dilawan atau dihentikan, dan bahwa warga desa sebaiknya menerima apapun ganti-rugi yang perusahaan bersedia berikan. Pheapimex secara rutin menggunakan keamanan swasta bersenjata-nya sendiri, dan juga polisi komune serta polisi militer untuk "melindungi" properti perusahaan di hadapan protes-protes lokal. Meskipun polisi setempat berempati pada komunitas yang terkena dampak, tugas mereka adalah melindungi perusahaan, bukan komunitas.

Memiskinkan Rakyat

"Sebelum perkebunan, bahkan 100 hektar tanah pertanian dan hutan bisa menopang ratusan keluarga; tetapi sekarang ribuan hektar diberikan kepada hanya satu perusahaan,

dan [pengaturan ini] bahkan tidak mampu memberi makan satu keluarga secara penuh." Warga dari Psach Latt, Pursat, Kamboja.

Kesaksian dari komunitas-komunitas yang terkena dampak menunjukkan bahwa konsesi Pheapimex merampok rakyat Kamboja dari warisan dan kekayaan alam, memiskinkan komunitas di dalam dan di sekitar wilayah-wilayah konsesi, serta menutup pilihan-pilihan nafkah untuk generasi masa depan. Wilayah-wilayah yang diberikan pada Pheapimex mencakup tanah pertanian, tanah penggembalaan, tanah basah, hutan, pepohonan, danau dan daerah aliran sungai, semuanya merupakan sebuah sistem infrastruktur alami tumpuan dan rawatan warga pedesaan untuk bertahan hidup dan keselamatan sehari-hari. Di beberapa wilayah, perkebunan menutup akses di antara desa-desa dan hutan serta padang penggembalaan. Karena hilangnya tanah-tanah merumpuk, keluarga-keluarga yang kena dampak telah mulai menjual sapi dan kerbau, yang merupakan bentuk kemakmuran tradisional penting di pedesaan Kamboja.

Pembukaan hutan untuk konsesi merusak keragaman-hayati dan sistem-sistem ekologis setempat, termasuk hutan primer yang berharga, sumber-sumber air, ikan dan margasatwa. Pohon-pohon yang bernilai ekonomis (seperti Knyung Beng, Neang Nun, Chheu Krom, Khnong dan Phchek) tengah dihabiskan, habitat satwa liar telah hilang dan daerah aliran sungai mengerut parah. Perusahaan telah mengurug empang-empang, menutup aliran air dan mengalihkan aliran air ke persemaian serta perkebunan mereka lewat kanal-kanal. Beberapa anak sungai telah mengering sama-sekali. Warga khawatir bahwa ini akan merusak perikanan lokal, terutama di Danau Tonle Sap. Anak-anak sungai membawa nutrisi ke danau untuk ikan dan banyak ikan bergerak ke hulu untuk berpijah; jika anak-anak sungai dan empang-empang tersumbat, seluruh kesehatan dan kualitas perikanan akan surut. Bertani juga menjadi makin sulit: warga tak bisa lagi menanam sayur-mayur dan tanaman penghasil uang di kebun sejak perusahaan mendominasi akses ke air. Tanpa tutupan hutan, air hujan tergelontor lebih cepat, erosi tanah tak terkendalikan, dan sedikit anak-anak sungai yang tersisa mendangkal.

Hutan dan pepohonan merupakan 'lemari' pangan dan obat-obatan yang penting bagi komunitas-komunitas yang terkena dampak, dan juga sumber untuk bahan bakar, bahan bangunan rumah serta produk hutan bukan kayu (NTFPs) seperti jamur, bambu dan akar rotan, madu, sulur-suluran, resin, akar-akaran, belukar liar dan buah-buahan. Hutan juga mempunyai nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan bagi komunitas-komunitas yang terkena dampak: perusahaan telah membuka hutan-hutan ruah yang disucikan di mana ritual-ritual tradisional diselenggarakan untuk perdamaian, panen yang berhasil, kemakmuran dan kesehatan. Lebih dari 6000 hektar hutan yang dikenal sebagai hutan komunitas telah hilang di komune Ansar Chambor dan Kbal Trach (Pursat). Warga Kbal Trach menaksir bahwa hilangnya pemasukan dari NTFP saja untuk setiap keluarga melebihi satu juga riel (245 dolar AS) setiap musim.

Ketika ukuran keluarga membesar, generasi yang lebih muda butuh tanah untuk bertani, yang sekarang tak lagi tersedia untuk mereka. Sebuah prakarsa untuk memberikan sertifikat kepemilikan tanah desa di dalam dan di sekitar ELC dilancarkan oleh Perdana Menteri Hun Sen di 2012 (disebut Instruksi 01BB) menentukan batas atas 5 hektar masing-masing untuk tanah padi dan kebun bagi setiap orang dewasa, meskipun luas

nyata dari yang diberi sertifikat jauh lebih kecil di sebagian desa yang dipengaruhi oleh konsesi Pheapiex. Tetapi bahkan batasan 5 hektar mengabaikan kebutuhan lahan amsa depan dari mereka yang belum dewasa pada saat ini tetapi akan mencapai usia dewasa dalam tempo beberapa tahun.

Karena putus harapan, banyak warga telah mencari pekerjaan di perkebunan di mana mereka dihadapkan pada upah rencah - 600.000 riel atau 147 dolar AS untuk 30 hari - pembayaran yang tidak teratur dan kondisi pekerjaan yang buruk. Banyak keluarga sekarang harus bertahan hidup mengandalkan upah perkebunan untuk satu anggota keluarga, yang tak dapat menanggung seluruh keluarga yang sebelumnya mendapatkan makanan dan pendapatan dari padi, kebun, hutan dan anak sungai. Akibatnya, ikatan hutang lokal meningkat, migrasi keluar tengah naik dan keluarga-keluarga terpecah karena anggota keluarga pergi ke kota-kota atau ke Thailand yang bertetangga untuk mencari kerja.

Menjaga Keberlanjutan Perjuangan

Sejak belajar mengenai konsesi, warga di komunitas-komunitas yang kena dampak telah mencoba mempertahankan tanahnya, hutannya, nafkahnya dan hidupnya lewat beberapa cara. Mereka telah mengemukakan protes di kantor-kantor komune, distrik dan propinsi; menghalangi lalulintas di Jalan Raya 5 untuk membangun dukungan publik; menghentikan mesin-mesin membuka tanah pertanian dan hutan; serta menyerahkan pengaduan dengan pihak yang berwenang di semua tingkatan. Mereka telah menyelenggarakan upacara-upacara doa untuk keadilan di desa-desa, pagoda-pagoda dan di depan kantor-kantor pemerintahan. Mereka telah menyucikan pohon-pohon di situs-situs keramat mereka dan di satu tempat upacara setidaknya 1000 pohon disucikan, tetapi perusahaan tetap saja menebangnya.

Mengerahkan dan mengorganisir rakyat di delapan distrik yang tercakup dalam konsesi merupakan tantangan besar bagi warga yang secara bersamaan juga mencoba memberi makan keluarganya dan menutup pengeluaran. Konsesi bersifat besar-besaran bukan hanya dalam ukuran tetapi juga dalam kekuatan uang dan politik. Mereka yang melakukan protes dicap "dalang," ditahan dengan tuduhan palsu, dipencara dan didenda sejumlah besar uang. Sementara banyak yang letih dan ciut nyalinya, yang lain melihat harapan perubahan dalam jangka panjang. Pemilihan umum nasional yang baru saja berakhir menunjukkan dukungan penuh yang menurun bagi CPP dan ada kemungkinan bahwa basis massa CPP tengah melemah di mana konflik-konflik tanah-hutan paling tinggi.

Dalam ucapan dari seorang warga dari Krang Skea (Kampong Chhnang): "Kami seperti bambu yang mulai dengan satu pucuk rebung; kami harus menunggu sampai ada lebih banyak pucuk rebung dan bambu akan membesar."

Shalmali Guttal

Direktur di Focus on the Global South

(1) 10 Orang Terkaya di Kamboja. <http://investvine.com/cambodias-top-10-tycoons/>

(2) Penambang merambah tanah-tanah ulayat.

<http://www.rfa.org/english/news/cambodia/bauxite-06222011171620.html>

(3) Koneksi Pheapimex 'soal yang memprihatinkan'.

<http://www.phnompenhpost.com/national/pheapimex-ties-cause-concern> and
<https://sahrika.com/2016/12/20/villagers-wary-of-mkiri-mine-project/#more-27000>



Malaysia: Kelompok-Kelompok Masyarakat Asli dari seluruh dunia mengadopsi deklarasi anti-bendungan

Di bulan Desember 2015, masyarakat asli di Sarawak, Malaysia, merayakan sebuah kemenangan utama: pemerintah negara bagian mengumumkan sebuah moratorium dan, di 2016, membatalkan Bendungan Baram yang kontroversial (4). Perjuangan melawan bendungan tersebut telah merupakan inspirasi bagi banyak orang dan mengemuka secara mencolok dalam presentasi tentang "[Apa yang terjadi dengan hutan kami di Malaysia?](#)" di pertemuan bulan Nopember 2016 di Bangkok yang disebut dalam editorial dari Buletin ini. Kami oleh karenanya menerbitkan kembali artikel ini tentang sebuah pertemuan internasional dari para aktivis anti-bendungan yang berkumpul di tepian sungai Baram pada bulan Oktober 2015, beberapa bulan saja sebelum pemerintah negara bagian mengumumkan moratorium pembangunan bendungan Baram.

Artikel pertama terbit dalam Buletin WRM 220, Desember 2015

Para pejuang bendungan masyarakat asli dari seluruh dunia berkumpul pada tanggal 23 Oktober 2015 di tepian Sungai Baram di Sarawak, sebuah negara bagian Malaysia di pulau Borneo, untuk berdiri dalam kesetia-kawanan dengan rakyat yang berjuang melawan Bendungan Baram yang diusulkan. Di hari itu, dua blokade melawan Bendungan Baram merayakan ulang-tahunnya yang kedua. Bendungan Baram akan menenggelamkan elbih dari 400 km² hutan dan memindahkan sebesar 20.000 orang asli, sementara daya listriknya bahkan tidak dibutuhkan: Sarawak telah menghadapi

kelebihan daya. Karena adanya blokade-blokade tersebut, pekerjaan Bendungan Baram serta jalan masuknya telah dihentikan sepenuhnya untuk dua tahun belakangan.

Delegasi-delegasi masyarakat asli dari Indonesia, Filipina, Kamboja, Brazil, Amerika Serikat, Honduras, dan dari seluruh Malaysia berkumpul di Sarawak untuk berbagi pengalaman, menguatkan ikatan di antara komunitas-komunitas mereka serta membuat sebuah pernyataan bersama tentang bendungan-bendungan. Acara selama seminggu itu dinamai Pertemuan Puncak Masyarakat Asli Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Sungai (WISER) dan dituan-rumahi oleh jejaring akar-rumput Sarawak *SAVE Rivers* (1).

Baram untuk semua, semua untuk Baram

Para peserta WISER mengunjungi berbagai tempat yang penting bagi perlawanan menentang bendungan Baram, seperti situs-situs dari dua blokade dan situs rencana bendungan. Peter Kallang, ketua *SAVE Rivers* dan tuan rumah WISER, menjelaskan: "Kami dari *SAVE River* menginginkan para peserta untuk mengalami kebudayaan kami dan untuk melihat sendiri keindahan dari Sungai Baram, sehingga mereka bisa memahami lebih baik apa yang sedang dipertaruhkan dan kenapa kami berjuang."

Di situs rencana bendungan, yang dicapai dengan perahu, Peter Kallang menceritakan sebuah anekdot: "Di 2012, perusahaan listrik Sarawak dan pembangun bendungan Sarawak Energy mengorganisir sebuah ritual doa asli tradisional di situs dari usulan bendungan Baram untuk memberkati pembangunan bendungan. Segera saja, komunitas lokal bereaksi dengan protes di perahu-perahu di situs tersebut terhadap penyalahgunaan dari doa tradisional mereka. Itu merupakan momen kunci dalam mobilisasi melawan bendungan."

Cerita tentang mempertahankan Sungai Baram secara simbolis mewakili nasib dari banyak kelompok asli yang terancam oleh bendungan. Berta Cáceres, pemenang Hadiah Lingkungan Hidup Goldman 2015 (2) dari Honduras, terkesan oleh kesamaan di antara berbagai ancaman yang dihadapi komunitas-komunitas dan menekankan pentingnya WISER: "Pertemuan puncak mengenai masyarakat asli dan sungai ini mempunyai nilai khusus yaitu bahwa aksi-aksinya memberikan kekuatan pada perlawanan menyejarah dari masyarakat kami dan mempertontonkan serbuan-serbuan ganas dan konflik yang dibangkitkan oleh privatisasi sungai dan konstruksi bendungan dalam komunitas-komunitas dan wilayah-wilayah asli."

Deklarasi WISER Baram 2015

Lokakarya-lokakarya diselenggarakan di desa Tanjung Tepalit, satu dari 26 desa yang akan digenangi oleh Bendungan Baram. Para peserta mendiskusikan motivasi mereka untuk berjuang melawan bendungan, tantangan-tantangan terhadap kampanye mereka dan juga strategi-strategi yang berhasil untuk memobilisasi orang dan untuk melangkah maju dalam perjuangan masing-masing.

James Nyurang, bekas kepala desa Tanjung Tepalit dan tuan rumah dari delegasi internasional, yakin bahwa masyarakat Baram mendapatkan kekuatan lewat pertemuan

puncak tersebut untuk meneruskan perjuangan: "Berada bersama-sama dengan semua utusan berbagai dan membahas berbagai strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan bagaimana menghentikan semua bendungan yang tidak diperlukan di dunia, saya memperoleh banyak pengalaman dari semua utusan. Dan dengan informasi seperti itu, saya cukup yakin pengalaman-pengalaman tersebut akan bersifat mendasar bagi kami - masyarakat Baram - dan bagi strategi-strategi kami untuk melanjutkan perjuangan dan menghentikan Bendungan Baram yang diusulkan."

Diskusi-diskusi mengerucut dalam penyepakatan dari "[Deklarasi WISER Baram 2015 tentang Bendungan-Bendungan dan Hak-Hak Masyarakat Asli](#)". (3) Deklarasi tersebut mengakui penderitaan dan perusakan meluas yang diakibatkan oleh bendungan-bendungan. Pemerintahan, perusahaan-perusahaan dan investor-investor didesak untuk tidak meneruskan proyek-proyek yang tidak mendapatkan kesepakatan yang bebas, di awal dan dengan kecukupan informasi dari komunitas-komunitas yang terkena dampak, untuk meratifikasi dan menegakkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli (UNDRIP) serta Konvensi ILO 169 serta menerapkan alternatif-alternatif energi terbarukan skala kecil dalam konteks perdesaan. Deklarasi tersebut juga menuntut pemulihan bagi komunitas-komunitas yang telah menderita karena bendungan serta untuk melakukan kajian mengenai pembongkaran bendungan-bendungan.

Para peserta menekankan bahwa bendungan-bendungan seharusnya tidak lagi dikemukakan sebagai tidak berdampak bagi iklim. "Kami menyampaikan seruan tegas kepada Pertemuan Puncak Perubahan Iklim berikutnya di Paris untuk mendengarkan dan menghormati masyarakat Asli dan alternatif-alternatif bagi perubahan iklim yang komunitas kami ajukan", kata Berta Cáceres, yang tengah melawan Bendungan Agua Zarca di Honduras, pada jumpa pers terakhir dari WISER di kota Miri.

Perjuangan dan harapan

Semua peserta berbagi penderitaan yang disebabkan oleh hilangnya kebudayaan dan warisan serta lingkungan alam di mana mereka dan komunitas mereka merupakan bagian darinya, penyisihan dari pengambilan keputusan dan bahkan kriminalisasi serta militerisasi.

Tetapi ada juga cerita-cerita sukses: Kundy Doeam dan Dinith Yoen dari Kamboja menuturkan bagaimana mereka mencapai sebuah moratorium tentang Bendungan Areng tahun ini setelah kampanye intensif, antara lain dengan blokade-blokade, kampanye sepeda. Sammy dan John Luke Gensaw dari suku Yurok di California, Amerika Serikat, menerangkan bahwa sementara empat bendungan di Sungai Klamath masih berdiri dan mengancam ikan salmon, basis penghidupan dari suku Yurok, pemerintah AS telah mulai menghentikan operasi bendungan-bendungan di tempat-tempat lain. Kemudian, sistem-sistem ekologis juga memulihkan diri dengan cepat melebihi harapan.

Masyarakat di Baram juga makin lebih berharap bahwa bendungan tersebut akan dihentikan. Pertama-tama, perlawanan mereka telah cukup berkembang dan blokade-blokade telah efektif dalam menghentikan proyek. Di bulan Juni, Peter Kallang dan Daniel Kammen, profesor dari Universitas California, Berkeley, bertemu dengan Menteri Utama Sarawak Adenan Satem untuk mendiskusikan sumber-sumber energi

tandingan dari bendungan. Di bulan September, Menteri Utama Sarawak Adenan Satem mengumumkan sebuah moratorium dari Dam Baram.

Meskipun demikian, cerita Daniela Da Silva tentang Bendungan Belo Monte di Amazon Brazil mengingatkan kita bahwa keberhasilan itu rapuh. Dia berbicara tentang bagaimana pendahulu dari Bendungan Belo Monte, yaitu Bendungan Kararao, telah dikalahkan oleh protes-protes meluas di akhir 1980an, tetapi berganti nama dan dihidupkan kembali oleh pemerintah di belakang hari. Bahkan beberapa keputusan pengadilan menentang proyek tersebut tak mampu menghentikan penyelesaian pembangunannya. Sedihnya, proyek-proyek bendungan yang diperkirakan mati seringkali dihidupkan kembali oleh pemerintah-pemerintah yang tak punya imajinasi.

Anna Aeberli

Bruno Manser Fund, www.bmf.ch/en

(1) SAVE Rivers didirikan empat tahun lalu sebagai jejaring komunitas untuk berjuang melawan setidaknya 12 rangkaian bendungan yang diusulkan oleh pemerintah Sarawak. Bendungan Baram dengan cepat menjadi proyek yang paling kontroversial di antara rangkaian bendungan tersebut.

(2) The Goldman Environmental Prize memberikan penghormatan pada para pejuang lingkungan akar-rumput dan memberikan pengakuan pada mereka untuk ikhtiar mereka melindungi lingkungan alam, seringkali dengan risiko pribadi yang besar. Hanya beberapa bulan setelah berbiara di pertemuan di tepian sungai Baram tentang perjuangan masyarakat Lenca melawan Bendungan Agua Zarca di Honduras, [Berta Cáceres dibunuh di dalam rumah kediamannya](#).

(3) Baca deklarasinya: http://www.stop-corruption-dams.org/resources/WISER_Baram_2015_Declaration_Signed.pdf

(4) Keajaiban Baram: Rencana-rencana bendungan secara resmi dibatalkan. Bruno Manser Fund News. <http://bmf.ch/en/news/the-baram-miracle-dam-plans-officially-scraped>

RAKYAT BERTINDAK



Honduras: Negara paling mematikan di dunia untuk aktivisme lingkungan hidup. Lebih dari 120 orang telah dibunuh di Honduras sejak 2009 karena melawan perusahaan yang merampas tanah dan merusak hutan, seperti ditunjukkan oleh sebuah laporan di bulan Januari 2017 yang diterbitkan oleh Global Witness. Laporan tersebut memberikan penghormatan pada pembela hak-hak asasi manusia Berta Cáceres yang dibunuh pada tanggal 2 Maret 2016 ketika segerombolan lelaki

bersenjata menerobos masuk rumahnya di tengah malam dan membunuhnya. Berta Cáceres menggalang perlawanan menentang bendungan PLTA Agua Zarca di tanah komunitasnya di Intibucá, Honduras barat, yang mengancam sebuah sumber air vital dan disucikan bagi masyarakat asli Lenca. Laporrannya tersedia di:

<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-environmental-activism/>



Guyana Perancis: Pemerintah Perancis diam-diam mendorong industrialisasi pertambangan emas di Guyana Perancis. Bila proyeknya berlanjut, proyek Montagne d'Or, dijadwalkan untuk mulai melakukan penambangan di 2018, akan menjadi tambang emas terbesar di wilayah Perancis. Bukan saja ia akan membawa dampak kemanusiaan dan lingkungan hidup yang serius, tetapi ia juga membukakan pintu penahan banjir bagi perusahaan-perusahaanmultinasional lainnya

di Guyana Perancis, dan meluaskan pertambangan yang ditujukan hanya bagi pasar perhiasan mewah. Permintaan industrial untuk emas berjumlah hanya 8 persen dari emas yang saat ini ditambang. Sektor daur-ulang memasok tiga kali jumlah tersebut di 2015. Informasi lebih lanjut tentang perjuangan melawan tambang di Guyana Perancis ini (dalam bahasa Perancis) di:

<https://sites.google.com/site/maiourinature/or-de-question-cp22fev>

Ayo dukung *Or de question* collective, sebuah aliansi dari ORNOP lokal dan nasional, yang menyerukan kepada pemerintah Perancis untuk membatalkan proyek-proyek pertambangan raksasa sekarang juga. Tandatangani petisi di: <https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1084/no-to-industrial-gold-mining-in-the-forests-of-french-guiana#letter>



India: Investigasi BBC menyingkap korban-korban dari peraturan tembak-mati di suaka harimau.

Di seluruh dunia, masyarakat asli menghadapi penahanan, pelecehan, penyiksaan dan kematian atas nama konservasi alam. Taman Nasional Kaziranga di India hanya satu saja dari contoh nista tentang kecenderungan kekejaman ini. Limapuluh orang telah dieksekusi di luar pengadilan oleh penjaga taman di taman nasional "tembak-mati" yang nista tersebut dalam tiga tahun belakangan. Masyarakat kesukuan

menghadapi ditembak, dipukul, disiksa dan dibunuh di tangan para pejabat taman yang bersenjata lengkap. Tahun lalu para petugas keamanan menembak seorang anak laki-

laki berusia 7 tahun yang sekarang cacat seumur hidup. Kekerasan ini dilakukan atas nama konservasi. Organisasi-organisasi konservasi termasuk WWF, *Wildlife Conservation Society*, *Nature Conservancy* dan *Conservation International*, antara lain, telah mengabaikan tuntutan agar mereka mengutuk praktik tersebut.

Kaziranga National Park shootings no isolated incident, *The Tiger Game* shows. Rangkaian Penembakan Taman Nasional Kaziranga bukan kejadian unik.

Pemerintah India telah mengumumkan rencana-rencana untuk meluaskan kebijakan cagar harimau di seluruh India. Film *Permainan Harimau* oleh aktivis dan pembuat film India Soumitra Ghosh menunjukkan bahwa situasi di Taman Nasional Kaziranga bukanlah sebuah kejadian terpisah, dan bahwa ketentuan tersebut telah merupakan kenyataan di Suaka Harimau Buxa di Bengal Barat. Film tersebut menggali tuturan majemuk dan tumpang tindih tentang eksploitasi, kebengisan dan ketidakadilan, pembunuhan yang keji terhadap masyarakat kesukuan oleh pekerja dinas perhutanan atas nama konserasi satwa liar. Film tersebut (dalam bahasa Inggris) tersedia di: <https://vimeo.com/124188855>

Ikuti *Survival International Action Alert* dan mintalah pada pemerintah yang berwenang di India untuk mengakhiri ketentuan tembak-di-tempat di wilayah lindung, di:

<http://www.survivalinternational.org/emails/shoot-on-sight>

Informasi tambahan (dalam bahasa Inggris) di: <http://www.conservation-watch.org/2017/03/10/indias-kaziranga-national-park-and-the-streisand-effect/>



Malaysia: Hentikan pengakuan perkebunan sebagai hutan, FAO diingatkan. Pada tanggal 21 Maret 2017, ORNOP-ORNOP Malaysia *The Consumers' Association of Penang (CAP)* dan Sahabat Alam Malaysia (SAM) bergabung dengan aksi sedunia menentang definisi hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (*UN Food and Agriculture Organisation/FAO*). Sekitar 200 kelompok telah memperbarui tuntutan bagi FAO agar mengubah definisinya yang menyesatkan tentang hutan yang telah memungkinkan perkebunan tanaman industri untuk meluas. Surat tersebut meminta FAO untuk

berhenti mengakui perkebunan sebagai hutan, sebagaimana dijelaskan dalam definisi sebab hal ini telah memungkinkan industri perkebunan untuk menyembunyikan dampak-dampak ekologis dan sosial yang parah dari perkebunan tanaman monokultur di balik citra positif hutan dalam pandangan umum.

<http://www.freemalysiatoday.com/category/nation/2017/03/21/stop-recognising-plantations-as-forests-un-body-told/>

Surat yang dikirimkan ke FAO hari ini bisa ditemukan [di sini](#). Ia juga terdapat dalam bahasa [Spanyol](#), [Perancis](#) dan [Portugis](#). Untuk informasi lebih jauh tentang tuntutan yang telah lama diajukan ke FAO untuk mengubah definisinya yang menyesatkan tentang hutan, lihat juga: <http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-of-the-forests-march-21st-2017/>



Indonesia: Protes di Jawa menentang perusakan bentang-alam karst oleh industri semen yang meluas.

Di Indonesia, perlawanan menentang kompleks produksi semen dari perusahaan Indonesia PT Semen Indonesia Tbk. yang akan merusak wilayah bentang-alam karst Kendeng di perbukitan Jawa, telah membesar. Patmi, seorang perempuan dari salah satu desa di distrik Tambakromo menempuh perjalanan ke ibukota Jakarta untuk mengikuti protes melawan perusakan ekosistem karst untuk produksi semen. Dia meninggal pada tanggal 21 Maret, kemungkinan karena serangan jantung,

setelah sehari-hari protes-duduk di depan Istana Presiden di Jakarta. Makin banyak aktivis di Jakarta dan kota-kota utama di Indonesia yang mengecor kaki mereka dalam semen serta melakukan protes duduk yang serupa, dalam kesetia-kawanan dengan Patmi dan masyarakat Kendeng. Para protestor meminta solidaritas dari komunitas internasional untuk mendukung perjuangan ini, terutama di hadapan kemungkinan untuk melanjutkan produksi semen oleh Presiden di awal April 2017. Proyek ini berlangsung dalam konteks bangkitnya perampasan tanah dan air yang besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk konsumsi energi dan bahan-bahan alami di wilayah Asia Tenggara, melalui pembangunan "koridor-koridor" bagi pembangunan infrastruktur, yang merambah jauh ke dalam hutan yang masih tersisa di wilayah tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat sebuah artikel pendek dan obituari terlampir dalam bahasa Inggris, didedikasikan bagi Patmi, ditulis oleh Hendro Sangkoyo:

<http://wrm.org.uy/other-relevant-information/the-poetic-and-haunting-death-of-patmi-of-mt-kendeng-java-indonesia/>

PATUT DIBACA



Laporan Pertemuan: Apa yang tengah terjadi dengan hutan kita?

Dari tanggal 21 sampai 25 Nopember 2016, sekitar 50 orang yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan wilayah-hidup, hutan dan sumber penghidupan dari komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan, berkumpul bersama di Thailand untuk sebuah kunjungan lapangan ke wilayah Timur-laut negeri, diikuti dengan sebuah pertemuan 3-hari di Bangkok. Di samping delegasi dari Thailand, para peserta lainnya datang dari Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia dan India.

Tujuan pertemuan, yang berfokus pada pertanyaan sentral tentang 'Apa yang tengah terjadi pada hutan kita?', mencakup ajakan pertukaran pengalaman dan dialog mengenai ancaman dan tantangan-tantangan lama dan baru yang dihadapi komunitas-komunitas di berbagai negara. Lepas dari keragaman bahasa dan kebudayaan dari para peserta, mereka menjadi sadar bahwa mereka memiliki banyak nilai-nilai dan keprihatinan yang sama, misalnya pentingnya hutan bagi sumber penghidupan, seperti halnya dengan ancaman-ancaman serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan wilayah hidup serta hutan mereka dari perampasan tanah serta deforestasi. Laporan tersebut beserta tautan ke presentasi-presentasi dari pertemuan

terdapat di: <http://focusweb.org/content/what-happening-our-forests-conference-report-and-presentations> (English only).



Video *Save our River, Save our Life* (Selamatkan Sungai Kami, Selamatkan Kehidupan Kami) mengenai ancaman-ancaman dari penambangan emas di Sungai Tanintharyi di Myanmar.

"Air adalah kehidupan. Jika kita tidak melindungi Sungai Tanintharyi, kehidupan dan nafkah warga-perdesaan setempat yang bergantung pada sungai akan hancur", tutur seorang warga desa setempat dari cekungan sungai Tanintharyi dalam pendahuluan dari film. "Kita harus mencegah perusakan dari sungai tersebut untuk kepentingan generasi-generasi masa

depan. Kami berkumpul di sini untuk menunjukkan ketidak-sepakatan kami terhadap penambangan emas di Sungai Tanintharyi", dia jelaskan.

Video tersebut mendokumentasikan sebuah pelayanan doa gabungan Buddha-Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat lokal dari cekungan Sungai Tanintharyi untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap operasi penambangan emas secara mekanis yang baru saja dimulai oleh Perusahaan Shwe Tun Pauk di Sungai Tanintharyi di Myanmar. Lebih dari 200 warga desa - mewakili 60 desa - menempuh perjalanan dengan perahu untuk mengikuti pelayanan doa daritempat sejauh 160 km di hilir. Kelompok tersebut juga memeriksa operasi pertambangan, dan meminta untuk melihat surat-surat yang membuktikan bahwa Perusahaan Shwe tun Pauk memiliki ijin sah untuk melakukan penambangan emas di Sungai Tanintharyi. Warga desa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari para pekerja lapangan, dan menuntut pertemuan terbuka dengan kepala dari perusahaan Shwe Tun Pauk. Sebuah pertemuan umum dengan kepala perusahaan Shwe Tun Pauk dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016. Video dokumentasi dari pertemuan tersebut tersedia di:

<https://www.youtube.com/watch?v=mPolcAAxtqo>

<https://www.youtube.com/watch?v=3sQ6IFITN9c>

Film *Save Our River, Save Our Life* tersedia dalam bahasa Inggris di:

https://www.youtube.com/watch?v=pxDA_P73ZDM . Versi bahasa Burma tersedia di:

https://www.youtube.com/watch?v=YR2mD_jTU4



Report: *Grow-ing disaster: the Fortune 500 goes farming. Laporan: Menanam bencana: Fortune 500 hendak bertani.* Korporasi-korporasi usaha-tani terbesar di dunia tengah meluncurkan sebuah program kemitraan publik-swasta untuk mengambil alih kontrol atas pangan dan pertanian di belahan Selatan Bumi. Program tersebut dinamai *Tanam*, dan dia adalah bagian dari "Visi Baru untuk Pertanian", sebuah inisiatif dari Forum Ekonomik Dunia (*World Economic Forum/WEF*) yang dilluncurkan di tahun 2009 dan dipimpin oleh 31 perusahaan "mitra" WEF yang terlibat

dalam usaha pangan. Sembilan-puluh persen dari persahaan-perusahaan ini berbasis di AS dan Eropa, dan tak satupun berasal dari China, Brazil, Jepang, Korea, Thailand atau Afrika Selatan. Meskipun demikian "Visi Baru untuk Pertanian" berfokus sepenuhnya pada Amerika Latin, Afrika dan Asia—pasar-pasar pertumbuhan utama untuk industri pangan global. Tekanan utama dari "Visi Baru untuk Pertanian" adalah tentang pertanian kontrak yang menghubungkan petani kecil pada perusahaan-perusahaan multinasional (dan bukannya, misalnya, pada perkebunan korporasi). Versi bahasa Inggris dari laporan tersebut yang diterbitkan oleh GRAIN tersedia di: <https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-fortune-500-goes-farming>. Versi Perancis dan Spanyol akan tersedia tak lama lagi.



Laporan: Mengapa & Bagaimana Pertanian Ekologis?! Lokakarya Pelatihan di Sekolah Pertanian-Ekologis HEPA, Vietnam. Laporan tersebut menggambarkan bagaimana sistem-sistem pertanian yang berakar di kebudayaan, hukum-hukum adat dan pengalaman khas-tempat dari pertanian rakyat-tani yang terhimpun melewati banyak generasi berbeda dari pertanian agro-industrial yang dipaparkan dalam beberapa artikel dari buletin ini sebagai perampasan tanah dan ancaman bagi hutan dan masyarakat hutan di wilayah Mekong (dan wilayah yang lebih luas lagi).

Laporan ini (dalam bahasa Inggris) tersedia di:

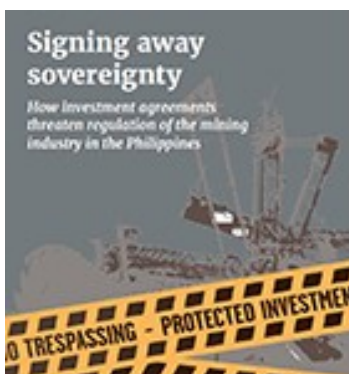
<http://cendiglobal.org/upload/medias/why-and-how-ecological-farming.pdf>



Wawancara: "Tidak ada minyak kelapa sawit berkelanjutan dari produksi kelapa sawit industrial". SwissInfo dalam percakapan dengan Kartini Samon dari GRAIN tentang dampak-dampak produksi kelapa sawit industrial pada kounitas dan tentang peran dari bank-bank Swiss dalam membiayai perampasan tanah dengan mendanai perluasan perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Wawancara tersebut (dalam bahasa Perancis) tersedia di:

http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-des-terres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-

[durable-/43009936](http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-des-terres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-durable-/43009936)



Laporan: Menanda-tangani Penyerahan Kedaulatan: Bagaimana Kesepakatan-Kesepakatan Investasi Mengancam Regulasi Industri Pertambangan di Filipina. Di dasawarsa yang lalu, Filipina bertaruh habis-habisan di industri pertambangan, dengan 47 tambang skala besar beroperasi dan dengan bukti-bukti yang terus bertambah tentang biaya sosial dan lingkungannya. Uraian berikut berpendapat bahwa kemampuan negara tersebut untuk benar-benar meregulasi atau menutup

tambang-tambang yang mencemari akan sangat terhambat oleh adanya jejaring perjanjian-perjanjian investasi yang Filipina telah tandatangani, yang memberikan perlindungan berlebihan pada investor asing. Belenggu hukum tersebut akan menjadi lebih ketat apabila pemerintah sepakat dengan Persetujuan Perdagangan Bebas Uni Eropa-Filipina serta Kemitraan Ekonomik Menyeluruh Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*). Laporan tersebut (dalam bahasa Inggris) tersedia di: <http://focusweb.org/content/signing-away-sovereignty-how-investment-agreements-threaten-regulation-mining-industry>

Berlangganan Buletin WRM

<http://wrm.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=ca171adcc2>

Buletin ini bertujuan mendukung dan memberikan kontribusi pada perjuangan dari Masyarakat Asli dan komunitas-komunitas tradisional atas hutan dan wilayah hidup mereka. Berlangganan bebas biaya.

Buletin Bulanan dari *World Rainforest Movement*

Buletin ini juga tersedia dalam bahasa Perancis, Spanyol dan Portugis

Pemimpin Redaksi: Winfridus Overbeek

Redaksi Pelaksana: Joanna Cabello

Asisten Redaksi: Elizabeth Díaz, Jutta Kill, Flavio Pazos, Teresa Perez

Sekretariat Internasional WRM

Avenida General María Paz 1615 office 3. CP 11400. Montevideo, Uruguay

Phone/Fax: +598 26056943

wrm@wrm.org.uy - <http://www.wrm.org.uy>